

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Geografis dan Wilayah Administratif

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan Provinsi kepulauan yang mempunyai 1.192 pulau, di mana 600 pulau mempunyai nama, 9 pulau masih diusulkan namanya dan 44 pulau berpenghuni. Luas wilayah 2.47.931,54 km² yang terdiri dari wilayah daratan seluas 47.931,54 km² dan wilayah lautan seluas 200.000 km². Secara geografis terletak di sebelah Selatan Khatulistiwa pada posisi 8°-12° Lintang Selatan dan 118° - 125° Bujur Timur.

NTT merupakan wilayah kepulauan yang disatukan Laut Sawu sebagai wilayah terdepan di Selatan Indonesia, posisinya sangat strategis karena berbatasan darat dengan Negara Timor Leste (sebelah Timur) dan berbatasan laut dengan Negara Australia (sebelah Selatan, Samudera Hindia/Lautan Indonesia). Sementara di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sebelah Utara dengan Laut Flores.

Wilayah administratif NTT terbagi atas 1 Kota dan 21 Kabupaten dengan sebaran wilayah administratif seperti disampaikan pada gambar berikut.



Sumber: Bappeda Provinsi NTT, 2022

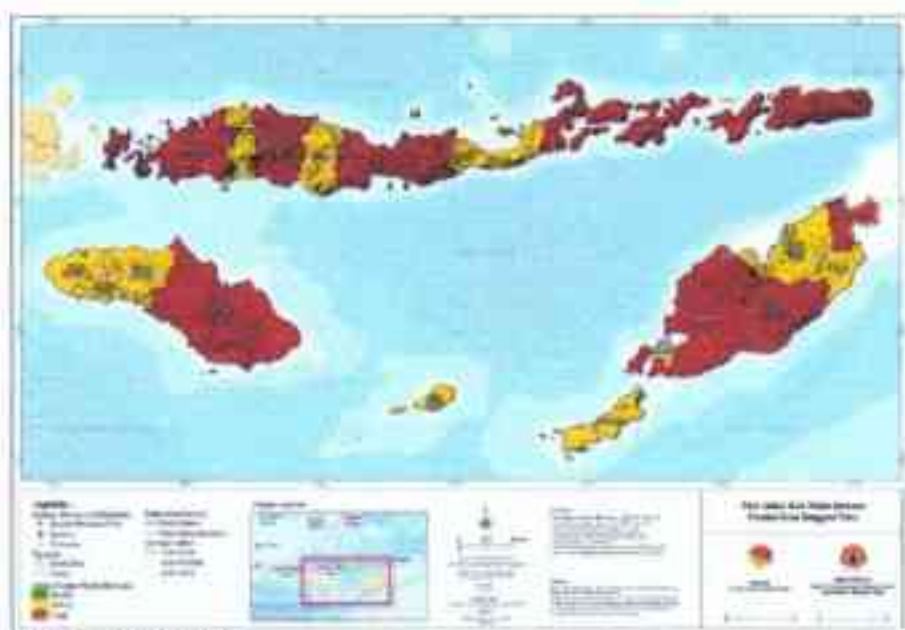
Gambar 2.1
Peta Provinsi NTT

Wilayah administratif terluas adalah Kabupaten Sumba Timur 7.005 km² (14,61 persen) dan Kabupaten Kupang dengan luas 5.525,83 km² (11,53 persen), sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Kupang dengan luas 180,27 km² (0,38 persen) dan Kabupaten Sabu Raijua dengan luas 460,47 km² (0,96 persen).

2.1.1.1 Wilayah Rawan Bencana

Nusa Tenggara Timur memiliki risiko bencana yang tinggi untuk jenis-jenis bencana geologis (gempa, tsunami, letusan gunung api dan longsor) serta hidrometeorologis (kekeringan, banjir, kebakaran lahan dan hutan). Risiko bencana geologis yang tinggi terutama terdapat di daerah dengan patahan aktif, seperti Flores, Lembata, Kepulauan Alor, dan bagian barat Pulau Sumba. Terdapat 13 gunung berapi aktif di pulau Flores dan Lembata, dan satu di Pulau Pantar, Kabupaten Alor. Tsunami di Sikka tahun 1992 masih tercatat sebagai bencana geologis yang paling banyak korban jiwa, yakni lebih dari 2.000 orang meninggal.

Sementara risiko bencana hidrometeorologis secara merata dialami oleh seluruh wilayah di NTT, terutama di daerah-daerah lereng curam, sekitar sungai dan juga daerah dengan curah hujan rendah seperti di Sabu Raijua, bagian selatan TTS, dan sebagainya. Dalam 50 tahun terakhir, 75% dari bencana di NTT adalah bencana hidrometeorologis, dengan kejadian yang paling banyak menimbulkan korban jiwa adalah banjir di Sungai Benanain (Kabupaten Malaka, dulu Belu) pada tahun 2000 yang menyebabkan lebih dari 150 orang meninggal dunia. Salah satu dari bencana hidrometeorologis yang melanda Provinsi pada awal bulan April 2021 adalah Badai Siklon Tropis Seroja, dimana terdapat 12 daerah Kabupaten/Kota yang mengalami dampak paling parah dari bencana tersebut. Total korban jiwa di beberapa kabupaten dan kota terdampak berjumlah 138 jiwa. Rincian korban meninggal dunia tersebut, yaitu Kabupaten Flores Timur 67 jiwa. Kemudian, Lembata 32, Alor 25, Kupang 5, Malaka 4, Sabu 2, Ngada 1, Ende 1 dan Kota Kupang 1. Sedangkan hilang, total dari laporan pertemuan koordinasi berjumlah 61 jiwa. Rincian sebagai berikut Kabupaten Lembata 35, Alor 20 dan Flores Timur 6. Sementara itu, kerugian material di sektor perumahan berjumlah 1.114 unit. Dengan rincian rusak berat 688 unit, rusak sedang 272 dan rusak ringan 154.



Sumber : BPRD, 2022

Gambar 2.2
Peta dan data Bencana di NTT Tahun 2021

Bencana hidrometeorologis merupakan jenis bencana yang dipengaruhi oleh kondisi iklim. Oleh karena itu, perubahan iklim, selain membawa akibat-akibat langsung seperti kenaikan muka dan suhu air laut, juga menyebabkan perubahan pola bencana hidrometeorologis. Ini bisa berdampak pada makin panjangnya kekeringan ataupun makin seringnya terjadi banjir maupun kebakaran hutan dan lahan.

Salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim adalah naiknya suhu udara, dimana panas matahari yang diserap bumi tidak dapat dilepaskan kembali ke atmosfer sehingga terpantul kembali ke bumi. Peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) disebabkan oleh kegiatan manusia (antropogenik) yang menghasilkan emisi terlalu banyak seperti CO₂, N₂O dan CH₂. Adapun sektor – sektor yang berkontribusi di dalam peningkatan emisi GRK berasal dari 4 sektor, yaitu :

1. Sektor Berbasis Lahan, seperti : Illegal logging, kebakaran hutan, pupuk organik, kotoran hewan (*manure*) dan pestisida.
2. Sektor Energi, seperti : Penggunaan bahan bakar fosil untuk energi pembangkit, transportasi dan industri.
3. Sektor Limbah, seperti : Pembakaran sampah padat, timbulan air limbah dan pembuangan limbah B3.
4. Sektor Kelautan dan Perikanan, seperti : Penebangan mangrove dan kerusakan padang lamun.

Selain berdampak pada kekerapan dan intensitas bencana-bencana hidrometeorologis, menghangatnya suhu juga mengubah habitat serangga, seperti nyamuk, sehingga terjadi perubahan pola insiden dan penyebaran penyakit malaria dan dengue. Selain itu, perubahan iklim juga menyebabkan pulau-pulau kecil terancam hilang karena naiknya muka air laut, serta terjadi pemutihan terumbu karang karena kenaikan suhu air laut. Ini mengganggu keanekaragaman hayati laut dan pesisir, serta produktivitas hasil-hasil laut.

Pembangunan di NTT perlu memperhatikan dampak perubahan iklim, terutama pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan kemaritiman yang merupakan sektor yang rentan pada perubahan iklim. Mengingat mata pencaharian utama di NTT adalah bertani terutama pertanian lahan kering yang tergantung pada variabel iklim seperti hujan, angin dan suhu udara untuk memproduksi pangan. Untuk itu perlu dikembangkan inovasi-inovasi pertanian dan perikanan yang memiliki daya adaptasi terhadap perubahan iklim termasuk di dalamnya adalah upaya rehabilitasi dan konservasi lahan.

2.1.1.2 Demografi Wilayah

Berdasarkan Data kependudukan dari BPS tahun 2021, Kependudukan Penduduk Provinsi NTT berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2021 adalah sebanyak 5.387.738 jiwa yang terdiri atas 2.694.297 laki-laki dan 2.693.441 perempuan. Rasio jenis kelamin Tahun 2021 adalah 100 yang berarti dari 100 perempuan hanya terdapat 100 laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk tahun hasil SP 2020 (September 2020) adalah 1,25 persen pada tahun di prediksi sebesar 0,87%. Kepadatan penduduk Tahun 2020 sebesar 111 Jiwa/Km² menurun dibandingkan dengan kepadatan penduduk tahun 2018 dan 2019 (BPS Nusa Tenggara Timur dalam Angka, 2022).

Penduduk terpadat terdapat di Kota Kupang dengan 2.511 jiwa per km². Kepadatan penduduk yang paling rendah adalah Sumba Timur dengan 35 jiwa per km² dan Sumba Tengah dengan 48 jiwa per km².

Tabel 2.1
Kepadatan Penduduk per Kabupaten/Kota di Provinsi NTT
tahun 2018-2021

Wilayah	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)			
	2018	2019	2020	2021
Kota Kupang	2.351	2.413	2.456	2.511
Sumba Barat Daya	234	239	210	212
Sumba Barat	173	176	197	201
Sabu Rajua	205	211	194	197

Wilayah	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)			
	2018	2019	2020	2021
Sikka	184	185	186	187
Belu	174	176	175	177
Manggarai	174	177	163	164
Flores Timur	145	146	158	160
Malaka	163	165	158	160
Ende	132	132	131	132
Timor Tengah Selatan	118	119	115	116
Nagekeo	102	103	113	115
Rote Ndao	129	134	112	114
Manggarai Timur	113	115	110	111
Lembata	111	113	107	109
Timor Tengah Utara	94	95	97	98
Ngada	94	95	96	97
Manggarai Barat	86	87	82	83
Alor	70	70	72	73
Kupang	70	73	66	67
Sumba Tengah	39	40	47	48
Sumba Timur	36	37	35	35
Nusa Tenggara Timur	112	114	111	112

Sumber : BPS NTT, 2022

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah terlihat dari arahan pola penggunaan lahan. Rencana pola ruang wilayah Provinsi NTT merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Provinsi yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

2.1.2.1 Pola Ruang Eksisting dan Aspek Pertanahan

2.1.2.1.1 Hutan Lindung

Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Sebaran hutan lindung di Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas 670.487, 57 Ha dimana terbesar berada di Kabupaten Kupang dengan luas wilayah hutan lindung 104.949,53 Ha dan terkecil seluas 1144,25 Ha di Kabupaten Sumba Barat.

Tabel. 2.2. Sebaran Luasan Hutan Lindung Tahun 2020

No	Wilayah	Hutan lindung (Hektar)
1	Sumba Barat	1.144,25
2	Sumba Timur	75.373,13
3	Kupang	104.949,53
4	Timor Tengah Selatan	35.243,32
5	Timor Tengah Utara	41.683,22
6	Belu	37.015,28
7	Alor	51.347,62
8	Lembata	46.630,71
9	Flores Timur	36.253,13
10	Sikka	33.647,82
11	Ende	24.089,00
12	Ngada	29.185,05
13	Manggarai	17.427,15
14	Rote Ndao	7.510,44
15	Manggarai Barat	54.345,93
16	Sumba Tengah	6.242,03
17	Sumba Barat Daya	11.041,24
18	Nagekeo	9.626,49
19	Manggarai Timur	32.783,05
20	Sabu Raijua	9.966,24
21	Malaka	3.855,17
22	Kota Kupang	1127,76
	Nusa Tenggara Timur	670.487,57

Sumber : BPS RI NTT 2010-2020 tahun 2021

2.1.2.1.2 Kawasan Konservasi

Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 1 ayat 2, pengertian konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Cagar alam dan suaka margasatwa merupakan Kawasan Suaka Alam (KSA), sementara taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam merupakan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Di Indonesia, kebijakan konservasi diatur ketentuannya dalam UU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. UU ini memiliki beberapa turunan Peraturan Pemerintah (PP), diantaranya:

- PP 68/1998 tentang pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)
- PP 7/1999 tentang pengawetan/perlindungan tumbuhan dan satwa
- PP 8/1999 tentang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar/TSL
- PP 36/2010 tentang pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa (SM), Taman nasional (TN), taman hutan raya (Tahura) dan taman wisata alam (TWA). Berikut merupakan luas Kawasan Konservasi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur:

Tabel 2.3. Kawasan Konservasi Provinsi NTT

No	Kabupaten	Kawasan Konservasi								
		CA	SM	SML	TAHURA	TB	TN	TNL	TWA	TWAL
1	Aloe								7.676,15	
2	Behi	3.181,39	4.548,16							
3	Ende	1.942,81					5.323,62			
4	Flora Timur									
5	Kupang		1.399,99		1.942,72	0,10			3.352,82	96,27
6	Lembata									
7	Manggarai								9.426,09	
8	Manggarai Barat	1.485,76					57.746,46	1.044,26		
9	Manggarai Timur								23.667,28	
10	Nagekeo									
11	Ngada	8.992,21							425,35	148,62
12	Rote Ndao		1.542,09	90,71		1.405,87				
13	Sabu Rujua									
14	Sikka		1.694,23						7.194,53	253,06
15	Sumba Barat						1.829,83			
16	Sumba Barat Daya									
17	Sumba Tengah						32.555,25			
18	Sumba Timur						61.961,37			
19	Timor Tengah Selatan	9.913,98	5.432,08			1.801,21				
20	Timor Tengah Utara	2.401,28								
21	Kota Kupang									3,23
	Jumlah	27.917,42	14.616,56	90,71	1.942,72	3.207,18	159.416,54	1.044,26	51.742,22	501,19

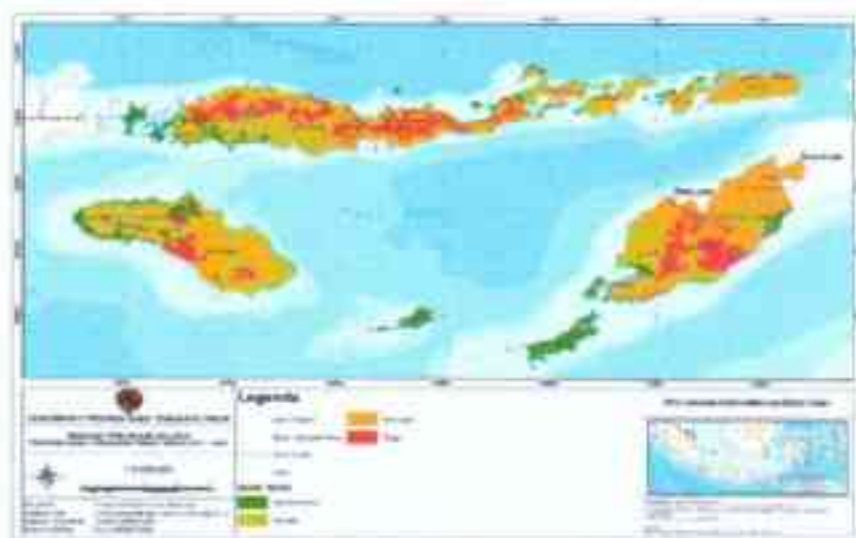
Sumber: Rencan RTRW NTT 2010-2030 tahun 2021

2.1.2.1.3 Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana di Provinsi NTT, terdiri atas: kawasan rawan longsor dan gerakan tanah kawasan rawan banjir. Kawasan rawan bencana Geologi

a. Longsor

Kawasan rawan longsor dan gerakan tanah terdapat di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat.



Gambar 2.3
Peta Risiko Bencana Tanah Longsor Provinsi NTT Tahun 2021

b. Banjir

Kawasan rawan banjir terdapat di Takari dan Noelmina di Kabupaten Kupang, Benanain di Kabupaten Belu, Dataran Bena dan Naemeto di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Ndona di Kabupaten Ende.



Gambar 2.4
Peta Risiko Bencana Banjir Provinsi NTT Tahun 2021

c. Gunung Berapi

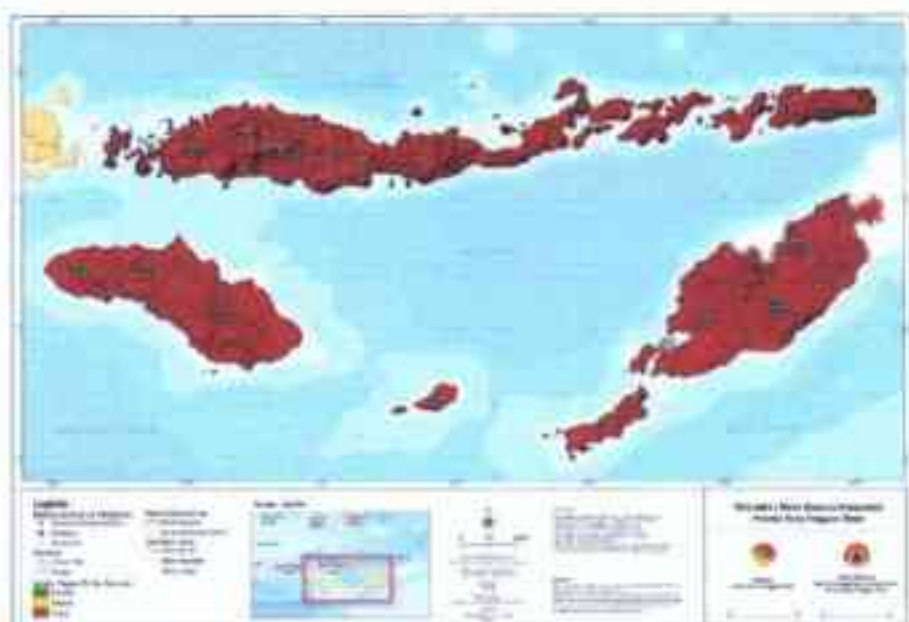
Kawasan rawan bencana gunung berapi meliputi : Kawasan Gunung Inelika, Gunung Ili Lewotolo, Gunung Ili Boleng, Gunung Lereboleng, Gunung Lewotobi Laki-laki dan Gunung Lewotobi Perempuan di Kabupaten Flores Timur; Kawasan Gunung Anak Ranakah di Kabupaten Manggarai; Kawasan Gunung Iya dan Gunung Kelimutu di Kabupaten Ende; Kawasan Gunung Inerie di Kabupaten Ngada; Kawasan Gunung Ebulobo di Kabupaten Nagekeo; Kawasan Gunung Rokatenda dan Gunung Egon di Kabupaten Sikka; Kawasan Gunung Sirung di Kabupaten Alor; dan Kawasan Gunung Batutara dan Gunung Ile Ape di Kabupaten Lembata.



Gambar 2.5
Peta Risiko Rawan Gunung Berapi Provinsi NTT Tahun 2021

d. Bencana Alam Geologi

Kawasan rawan bencana alam geologi, terdiri atas : **a) Kawasan Rawan bencana gempa** terdapat di Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Alor; Pulau Timor, Pantai Selatan Pulau Sabu dan Pantai Selatan Pulau Rote;



Sumber : BPSP 2022

Gambar 2.5

Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTT Tahun 2021

b). Kawasan rawan bencana gelombang pasang dan tsunami terdapat di Maumere Kabupaten Sikka, Daerah Atapupu/Pantai Utara Belu, Pantai Selatan Pulau Sumba, Pantai Utara Ende, Pantai Utara Flores Timur, Pantai Selatan Lembata, dan Pantai Selatan



Sumber : BPSP 2022

Gambar 2.6

Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTT Tahun 2021

2.1.2.2 Kawasan Ekosistem Mangrove

Pada wilayah NTT, belum ada data pasti tentang keragaman jenis dan berapa jumlah jenis mangrove yang dapat ditemui. Namun demikian dari beberapa penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa NTT juga memiliki keragaman jenis yang cukup tinggi. Seno, A (2012) mengatakan bahwa keragaman jenis mangrove di kawasan Taman Nasional (TN) Komodo mencapai 24 jenis yang terdiri dari 22 jenis mangrove sejati dan 2 jenis mangrove asosiasi. Hidayatullah, M. dkk (2012) melaporkan bahwa di desa Golo Sepang kecamatan Boleng-Manggarai Barat ditemukan sebanyak 10 jenis mangrove (9 jenis mangrove sejati dan 1 jenis mangrove asosiasi). Sementara itu Talib, M. F (2008) mengatakan bahwa di desa Tanah Merah dan Oebelo kecamatan Kupang Tengah memiliki 11 jenis mangrove yang kesemuanya merupakan mangrove sejati. Jafar, dkk (2007) mengatakan bahwa pada wilayah Teluk Kupang-Kota Kupang memiliki 6 jenis mangrove yang kesemuanya merupakan mangrove sejati. Hidayatullah, M. dkk (2013) menyebutkan bahwa di kawasan Cagar Alam Maubesi-Kabupaten Belu ditemukan sebanyak 23 jenis mangrove yang terdiri dari 16 jenis mangrove sejati dan 7 jenis mangrove asosiasi. (revisi RTRW 2010-2030)

2.1.2.3 Hutan Produksi (termasuk APL dan HGU)

Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi.

Tabel 2.5.
Luas Suaka Alam Dan Pelestarian Alam (Hektar) di Provinsi NTT

No	Kabupaten/Kota	Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Hektar)		
		2017	2018	2020
1	Sumba Barat	1772.22	1820.77	1820.77
2	Sumba Timur	56931.61	62062.60	62062.60
3	Kupang	69978.16	69878.19	69878.19
4	Timor Tengah Selatan	16991.04	15320.52	15320.52
5	Timor Tengah Utara	2405.33	2426.82	2426.82
6	Belu	-	-	-
7	Alor	7637.67	7705.69	7705.69
8	Lembata	-	-	-
9	Flores Timur	-	-	-
10	Sikka	72998.68	73705.82	73705.82
11	Ende	7065.57	7128.69	7128.69
12	Ngada	16714.07	16317.54	16317.54
13	Manggarai	8943.69	9426.09	9426.09
14	Rote Ndao	3648.07	2229.22	2229.22
15	Manggarai Barat	179107.31	180722.42	180722.42
16	Sumba Tengah	32382.82	32635.70	32635.70
17	Sumba Barat Daya	-	-	-
18	Nagekeo	-	-	-
19	Manggarai Timur	23856.58	23667.30	23667.30
20	Sabu Rajua	-	-	-
21	Malaka	7661.08	7729.55	7729.55
22	Kota Kupang	-	-	-
Nusa Tenggara Timur		508093.90	512776.92	512776.92

Sumber: Revisi RTRW NTT 2010-2030 tahun 2021

2.2 ASPEK KSEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Pertumbuhan PDRB

Berdasarkan harga konstan Tahun 2010, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTT terus mengalami peningkatan dan terjadi di seluruh lapangan usaha. Pada Tahun 2021 nilai PDRB NTT mencapai Rp.70,538 miliar dibanding tahun 2018 sebesar Rp. 65,929 miliar rupiah. Demikian halnya dengan pertumbuhan nilai PDRB berdasarkan harga berlaku juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, nilai PDRB NTT berdasarkan harga berlaku menurut lapangan usaha sebesar Rp 110,886 miliar meningkat dibanding tahun 2018 sebesar Rp. 98,930 miliar.

Tabel 2.6
PDRB ADHB-ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT
Tahun 2018-2021

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga (ADHB) Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi NTT (Miliar Rupiah)				Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Provinsi NTT (Miliar Rupiah)			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28.035	29.804	30.369	32.343	17.837	18.496	18.680	19.599
Pertambangan dan Penggalian	1.201	1.249	1.154	1.189	908	939	813	829
Industri Pengolahan	1.252	1.405	1.367	1.312	841	916	867	823
Pengadaan Listrik dan Gas	75,07	75,73	85,25	0,091	51	52	58	61
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	53,57	56,57	60,34	0,068	43	45	48	53
Konstruksi	10.744	11.606	10.454	11.485	7.254	7.576	6.832	7.311
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.025	12.266	11.888	12.724	7.785	8.382	7.880	8.216
Transportasi dan Pergudangan	5.459	5.834	4.917	5.058	3.528	3.646	3.203	3.282
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	756,61	805,79	593	0,613	492	524	381	399
Informasi dan Komunikasi	6,569	7,077	7,923	8,222	5,794	6,118	6,849	7,040
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,072	4,306	4,639	4,947	2,589	2,672	2,901	2,975
Real Estate	2,475	2,479	2,426	2,467	1,657	1,658	1,632	1,680
Jasa Perusahaan	0,292	0,306	0,191	0,164	0,174	0,181	0,110	0,094
Administrasi Pemerintahan,	13,232	14,573	15,183	14,866	8,482	9,175	9,598	9,267

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga (ADHB) Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi NTT (Miliar Rupiah)				Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Provinsi NTT (Miliar Rupiah)			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib								
Jasa Pendidikan	9,436	10,286	10,737	10,598	5,572	5,913	6,024	5,889
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,150	2,327	2,559	2,864	1,480	1,564	1,632	1,779
Jasa lainnya	2,098	2,266	1,946	1,870	1,434	1,528	1,294	1,232
PDRB	98,930	106,731	106,480	110,886	65,929	69,389	69,389	70,538

Sumber : BPS NTT, 2022; * Angka Sementara. ** Angka Bangkit Sementara.

Tabel 2.7
Persentase PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT
Tahun 2018 - 2021

Lapangan Usaha [Seri 2013]	PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha (%)			
	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,34	27,93	28,51	29,17
Pertambangan dan Penggalian	1,21	1,17	1,08	1,07
Industri Pengolahan	1,27	1,32	1,28	1,18
Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,07	0,08	0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,06	0,06
Konstruksi	10,86	10,87	9,82	10,36
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,14	11,49	11,16	11,48
Transportasi dan Pergudangan	5,52	5,47	4,62	4,56
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,76	0,75	0,56	0,55
Informasi dan Komunikasi	6,64	6,63	7,44	7,41
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,12	4,04	4,36	4,46
Real Estate	2,50	2,32	2,28	2,23
Jasa Perusahaan	0,30	0,29	0,18	0,15
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,38	13,65	14,26	13,41
Jasa Pendidikan	9,54	9,64	10,08	9,56
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,17	2,18	2,40	2,58
Jasa lainnya	2,12	2,12	1,83	1,69
PDRB	100	100	100	100

Sumber : BPS NTT, 2022

Dari Tabel 2.7 di atas, dapat dilihat bahwa Tahun 2018 hingga Tahun 2021, sektor pertanian merupakan sektor terbesar dalam ekonomi Nusa Tenggara Timur yang mana pada tahun 2018 mengkomposisi 28,34 %, tahun 2019 sebesar 27,93 %, 2020 sebesar 28,51 %, dan pada tahun 2021 sebesar 29,17 %. Sedangkan untuk sektor yang paling kecil dari tahun 2018 sampai Tahun 2021 adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 sebesar 0,05 %, tahun 2020 dan 2021 sebesar 0,06 %.

Tabel 2.8
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT (Persen)
Tahun 2018 - 2021

Lapangan Usaha [Seri 2010]	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT (Persen), 2018-2021			
	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,94	3,69	1,00	4,92
Pertambangan dan Penggalian	1,94	3,32	-13,33	1,90
Industri Pengolahan	5,16	9,01	-5,42	-5,10
Pengadaan Listrik dan Gas	9,57	0,82	12,29	4,88
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,47	5,44	6,04	11,34
Konstruksi	6,39	4,43	-9,82	7,01
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,33	7,66	-5,98	4,27
Transportasi dan Pergudangan	7,93	3,34	-12,16	2,47
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,16	6,43	-27,22	4,79
Informasi dan Komunikasi	4,89	5,59	11,96	2,79
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,50	3,22	8,57	2,56
Real Estate	4,85	0,00	-1,54	2,97
Jasa Perusahaan	1,67	3,86	-39,27	-14,67
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,56	8,17	4,61	-3,45
Jasa Pendidikan	2,41	6,12	1,89	-2,24
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,11	5,67	4,38	9,02
Jasa lainnya	6,47	6,55	-15,30	-4,74
PDRB	5,11	5,25	-0,84	2,51

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2022

Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, terus mengalami peningkatan secara nominal yaitu pada Tahun 2018 sebesar Rp. 65,929 miliar naik menjadi Rp. 70,538 miliar pada Tahun 2021, yang berdasarkan laju pertumbuhan tahun dasar 2010 PDRB Provinsi NTT mengalami perlambatan pada Tahun 2021 sebesar 2,60 persen dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar 5,11 persen.

2.2.2 Laju Inflasi

Inflasi Provinsi NTT pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar 1,67% (yoy), melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,74% (yoy). Inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Nasional sebesar 1,87% (yoy). Penurunan tekanan inflasi terutama didorong oleh penurunan inflasi dari harga kelompok komoditas makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 1,73% (yoy). Secara keseluruhan Tahun 2021, inflasi Provinsi NTT tercatat meningkat dibandingkan dengan inflasi Tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kelompok komoditas transportasi yang mengalami inflasi sebesar 4,16% (yoy) setelah pada tahun sebelumnya mengalami deflasi sebesar 4,66% (yoy). Meningkatnya tekanan inflasi mengindikasikan mulai pulihnya perekonomian seiring dengan kondisi Pandemi C-19 yang lebih terkendali dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.9
Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Nusa Tenggara Timur
Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100) , (2018=100)
Tahun 2018-2021

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2018	IHK Desember 2019	IHK Desember 2020	IHK Desember 2021	Inflasi (%)		
					Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2019	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2020	Tingkat Inflasi tahun Kalender 2021
Makanan, Minuman, dan Tembakau	152,79	104,21	104,15	108,21	1,03	0,72	1,73
Pakaian dan Alas Kaki	-	104,32	104,12	103,39	-	-0,14	-0,39
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	130,36	102,48	100,33	101,63	-0,06	-0,26	1,30
Sandang	130,32	104,73	105,81	-	2,01	0,58	-
Kesehatan	119,05	104,86	108,20	110,43	1,60	0,02	1,77
Transportasi	-	103,89	103,50	105,10	-	-0,19	4,16
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-	100,42	100,41	100,99	-	0,02	0,45
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	-	103,15	102,52	103,45	-	-0,39	0,63
Pendidikan	-	106,21	104,01	104,71	-	0,62	0,67
Pendidikan, Rekreasi dan Olah raga	134,72	-	107,60	-	2,18	-	-
Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	143,59	-	112,08	108,59	-1,74	-	-
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	-	105,22	101,22	103,22	-	1,53	1,91
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	-	105,94	108,44	109,26	-	4,23	0,92
Nusa Tenggara Timur	134,7	135,59	103,22	105,76	-0,14	0,78	1,67
Nasional	135,39	131,28	105,68	107,66	2,72	1,68	0,13

Sumber : BPS NTT Berita Resmi Statistik 2019, 2020, 2021

Dari Tabel 2.9. di atas, terlihat bahwa selama tahun 2019, kecenderungan inflasi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur masih mengikuti pola inflasi nasional, artinya bahwa inflasi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur tidak semata-mata diakibatkan oleh tekanan ekonomi internal di Nusa Tenggara Timur sendiri tetapi banyak juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang terjadi secara Nasional, dan jika dilihat dari trend inflasi tahun 2020 hanya 2021 terlihat bahwa angka inflasi mengalami penurunan. Perubahan terjadi pada Kelompok Pengeluaran dimana terdapat penambahan, penghilangan ataupun pemisahan nomenklatur, sehingga angka IHK pada Tahun 2019 dan Inflasi pada November Tahun 2020 semakin terinci, begitu juga yang terjadi pada Tahun 2021. Dimana, Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,93 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar -0,44 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,09 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,60 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,43 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,48 persen. Sedangkan inflasi NTT pada Tahun 2019 sebesar -0,14 % jika dibandingkan pada Tahun 2020 hanya sebesar 0,78 % dan tahun 2021 sebesar 0,77 %.

2.2.3 PDRB Per Kapita

PDRB Per kapita atas dasar berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku. PDRB Perkapita ADHB Provinsi NTT pada Tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 18,45 juta meningkat menjadi Rp. 19,59 juta pada Tahun 2019. Peningkatan ini dipengaruhi oleh produk-produk yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi dan disertai dengan perubahan harga-harga di pasar yang dari tahun ke tahun juga cenderung mengalami peningkatan (inflasi). Sedangkan berdasarkan PDRB per kapita ADHK pada Tahun 2018 sebesar Rp. 12,27 juta meningkat menjadi Rp. 12,71 juta pada Tahun 2019. PDRB per kapita ADHB mengalami penurunan dari Rp. 19,59 juta pada Tahun 2019 menjadi Rp. 19,22 juta di Tahun 2020, sementara PDRB Per kapita ADHK juga mengalami penurunan dari Rp. 12,71 juta pada tahun 2019 menjadi Rp. 12,41 juta di Tahun 2020 yang disebabkan oleh kontraksi ekonomi yang melanda dunia khususnya NTT akibat Pandemi Covid 19. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.10 di bawah ini.

Tabel 2.10
PDRB dan PDRB Per Kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2017 - 2020

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB (Miliar Rp)				
- ADHB	90.758,93	98.930,19	106.728,07	106.506,13
- ADHK 2010	62.725,41	65.929,19	69.385,99	68.806,67
PDRB perkapita (Ribu Rp)				
- ADHB	17.165,45	18.448,13	19.591,07	19.220,097
- ADHK 2010	11.863,41	12.276,77	12.714,42	12.416,851
Pertumbuhan				
PDRB perkapita ADHK 2010	-1,6	3,48	3,56	-2,34
Jumlah penduduk (000 org)	5.287,30	5.371,52	5.456,20	5.541,394

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, tahun, 2021

2.2.4 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Ketimpangan pendapatan berkaitan erat dengan distribusi pendapatan yang tidak merata.

Secara umum, sejak Maret 2016, angka Gini Ratio terus mengalami fluktuasi sampai dengan September 2018. Gini Ratio mengalami peningkatan tertinggi pada September 2016 yaitu sebesar 0,026 poin dibanding Maret 2016. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk pada periode tersebut semakin memburuk. Selanjutnya, selama periode September 2018 – Maret 2020, angka Gini Ratio mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran rumah tangga di Provinsi NTT. Namun

demikian, pada masa pandemi Covid-19, angka Gini Ratio mengalami kenaikan pada September 2020.

Selanjutnya, Indeks Gini Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2021 sebesar 0,339, yang menunjukkan bahwa “kecenderungan ketimpangan pendapatan” tidak mengalami perubahan atau dapat dikatakan ketimpangan di NTT tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Jika dibandingkan dengan gini rasio nasional sebesar 0,39, maka indeks Gini NTT lebih rendah yang mengindikasikan ketimpangan di NTT tidak sedalam ketimpangan yang terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia. Hal ini disebabkan karena gap pendapatan antara penduduk golongan pendapatan tinggi dengan yang rendah di NTT tidak sedalam gap pendapatan antara golongan pendapatan tinggi dan rendah di daerah lain.



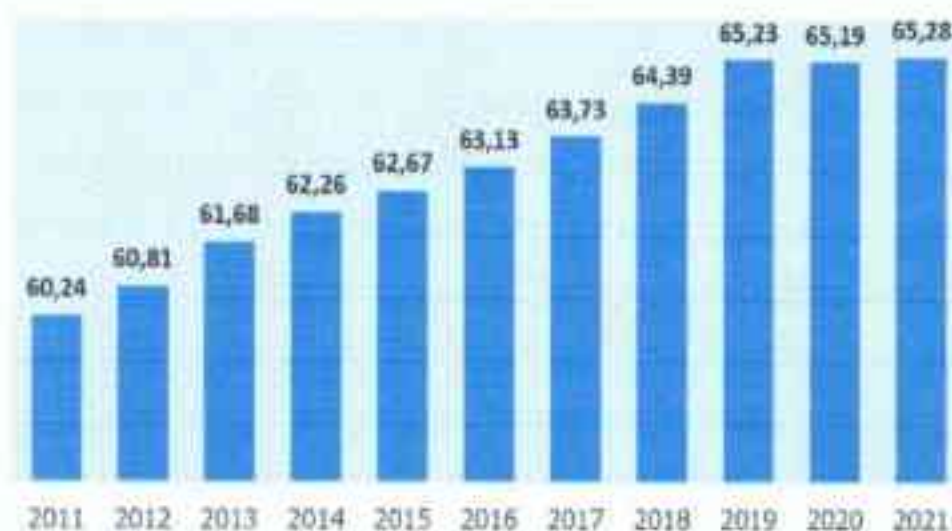
Sumber: BPS BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Suseknas)

Gambar. 2.7
Grafik Gini Ratio Provinsi NTT tahun 2016-2021

2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index (HDI)* merupakan sebuah instrumen yang dikembangkan oleh *United Nations Development Program (UNDP)* untuk memotret kinerja pembangunan manusia pada 3 (tiga) dimensi, yakni Umur Panjang dan Hidup Sehat (kesehatan), Pengetahuan (pendidikan), dan Standar Hidup Layak (ekonomi). Umur

Harapan Hidup (*Life Expectancy*) merupakan indikator yang digunakan oleh UNDP untuk mengukur capaian dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat. Pada dimensi Pengetahuan, indikator yang digunakan untuk mengukur capaiannya adalah Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling*) dan Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*), sedangkan untuk mengukur capaian dimensi Standar Hidup Layak, indikator yang digunakan adalah Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*Gross National Income per capita (PPP \$)*). Dalam menghitung IPM di Indonesia, BPS menggunakan metodologi penghitungan dan dimensi yang serupa dengan UNDP. Meski demikian, sehubungan dengan faktor ketersediaan data pada level Kabupaten/ Kota, terdapat penyesuaian yang dilakukan oleh BPS, yakni penggunaan indikator Pengeluaran Riil per kapita untuk menggantikan indikator PNB per kapita (BPS, 2022b, p.10).



Sumber: BPS NTT, 2022

Gambar 2.8
IPM NTT tahun 2011-2021

Dalam konteks Nusa Tenggara Timur, angka IPM terus menunjukkan peningkatan pada 2 (dua) dekade terakhir. Gambar 2.8 memuat tren IPM NTT antara tahun 2011 dan 2021. Berdasarkan Gambar 2.8, tampak bahwa di awal periode (Tahun 2011), IPM NTT hanya sebesar 60,24 poin. Pada tahun selanjutnya, IPM NTT terus mengalami peningkatan yang berarti, yakni di atas 0,4 poin per tahun dan mencapai 65,23 poin di tahun 2019. Meski demikian, sejak tahun 2020 tren peningkatan IPM tersebut mengalami stagnansi dimana di Tahun 2021 capaian IPM NTT sebesar 65,28 poin.

Tabel 2.11
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
di Provinsi NTT Menurut Komponen, Tahun 2015-2021

Indikator	Tahun						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Umur Harapan Hidup (thn)	65,96	66,04	66,07	66,38	66,85	67,01	67,15
Harapan Lama Sekolah (HLS) (thn)	12,84	12,97	13,07	13,10	13,15	13,18	13,20
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (thn)	6,93	7,02	7,15	7,30	7,55	7,63	7,69
Pengeluaran per Kapita (PPP)(Rp.000)	7,003	7,122	7,350	7,566	7,769	7,598	7,554
IPM NTT	62,67	63,13	63,73	64,39	65,23	65,19	65,28
IPM Rata-rata Nasional	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29

Sumber: BPS NTT, 2022

Pada Tabel 2.11, dapat dilihat pula rincian capaian 4 (empat) komponen atau indikator IPM sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Dalam periode tersebut, tampak bahwa terjadi peningkatan pada ke-empat komponen yang ada. Meski demikian, capaian akhir setiap komponen tersebut masih cukup rendah yang menyebabkan angka IPM NTT di tahun 2021 yang masih jauh di bawah rata-rata nasional, yang telah mencapai 72,29 poin. Kenaikan IPM periode 2011- 2018 terjadi karena adanya kenaikan pada 3 (tiga) dimensi yaitu Umur Harapan Hidup, Pendidikan dan Ekonomi, akan tetapi penurunan pada periode Tahun 2019-2020 terjadi akibat adanya Pandemi Covid-19 khususnya pada indikator pengeluaran per kapita.

2.2.5.1 Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Dengan kata lain, pengeluaran per kapita merupakan instrumen yang digunakan untuk memotret kemampuan rata-rata individu-individu dalam setiap rumah dalam aspek konsumsi.

Tabel 2.12 merincikan jumlah pengeluaran per kapita pada setiap Kabupaten/ Kota di NTT pada Tahun 2019 sampai dengan 2021. Pada Tabel 2.12, tampak bahwa pengeluaran per kapita tertinggi pada level Kabupaten/ Kota berada pada Kota Kupang, yakni pada kisaran Rp 13 juta, sedangkan pada 21 kabupaten lainnya di NTT, besaran pengeluaran per kapita masih berada pada kisaran Rp 5 - 9 juta. Tingginya ketimpangan antar daerah di Provinsi NTT menjadi penyebab tingginya ketimpangan pengeluaran

masyarakat dan tidak optimalnya pertumbuhan ekonomi. Perekonomian di Provinsi NTT sangat terpusat di Kota Kupang. PDRB Perkapita dan pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang jauh di atas kabupaten yang lain di Provinsi NTT.

Tren data pada Tabel 2.12 juga menunjukkan bahwa sejak Tahun 2020, telah terjadi penurunan pengeluaran per kapita pada setiap entitas pemerintahan, baik pada level Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. Pada level provinsi, khususnya, terjadi penurunan pengeluaran per kapita dari sebesar Rp 7,769 juta di tahun 2019, menjadi sebesar Rp 7,598 juta di Tahun 2020. Pada tahun selanjutnya (2021), kembali terjadi penurunan menjadi sebesar Rp. 7,554 juta.

Tabel 2.12
Jumlah Pengeluaran per Kapita di Provinsi NTT
Tahun 2019-2021

Wilayah	[Metode Baru] Pengeluaran Riil per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten / Kota (Ribu Rupiah)		
	2019	2020	2021
Sumba Barat	7586.00	7321.00	7307.00
Sumba Timur	9640.00	9406.00	9354.00
Kupang	7698.00	7526.00	7476.00
Timor Tengah Selatan	6955.00	6861.00	6839.00
Timor Tengah Utara	6479.00	6364.00	6324.00
Belu	7677.00	7479.00	7431.00
Alor	6958.00	6786.00	6751.00
Lembata	7474.00	7305.00	7257.00
Flores Timur	7770.00	7631.00	7578.00
Sikka	8313.00	8081.00	8021.00
Ende	9315.00	9094.00	9027.00
Ngada	8961.00	8865.00	8819.00
Manggarai	7276.00	7203.00	7133.00
Kote Ndao	6720.00	6539.00	6503.00
Manggarai Barat	7602.00	7468.00	7410.00
Sumba Tengah	6198.00	6108.00	6061.00
Sumba Barat Daya	6594.00	6372.00	6355.00
Nagekeo	8469.00	8309.00	8254.00
Manggarai Timur	5919.00	5818.00	5780.00
Sabu Raijua	5354.00	5265.00	5256.00
Malaka	5998.00	5901.00	5861.00
Kota Kupang	13592.00	13337.00	13218.00
Nusa Tenggara Timur	7769.00	7598.00	7554.00

Sumber : BPS NTT, 2022

2.2.5.2 Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk memotret kinerja pembangunan pada Sektor Kesehatan. Umur Harapan Hidup adalah Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Umur Harapan Hidup juga dipengaruhi dengan keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan, kebijakan pemerintah maupun perekonomian masyarakat.

UHH juga menjadi salah satu indikator yang diperhitungkan dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tabel 2.13 merincikan Umur Harapan Hidup di Provinsi NTT Tahun 2015-2021, menurut Kabupaten/Kota. Pada periode ini (2015-2021), UHH provinsi NTT menunjukkan tren kenaikan yang konstan. Di tahun 2015, UHH penduduk NTT sebesar 65,96 tahun. Pada tahun selanjutnya, UHH NTT terus menunjukan perbaikan dan mencapai 67,15 tahun di tahun 2021. Hal ini dapat dimaknai pula bahwa anak-anak yang lahir pada tahun 2021 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai dengan usia 67,15 tahun. Pada Tabel 2.13, tampak pula bahwa keseluruhan kabupaten/ kota memiliki tren kenaikan UHH. Meski demikian, disparitas UHH antara Kabupaten/ Kota masih cukup tinggi. Di tahun 2021, misalnya, tampak bahwa Kota Kupang memiliki UHH yang cukup tinggi jika dibanding 21 Kabupaten lainnya (69,73 tahun), sementara kabupaten lainnya berada pada angka 68 tahun ke bawah, dengan kabupaten dengan capaian UHH terendah yakni Rote Ndao (64,88 tahun), Alor (61,64 tahun), dan Sabu Raijua (60,66 tahun).

Tabel 2.13
Umur Harapan Hidup di Provinsi NTT Tahun 2015-2021

Wilayah	Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sumba Barat	65,11	66,15	66,20	66,58	66,98	67,08	67,12
Sumba Timur	63,88	64,00	64,12	64,45	64,94	65,13	65,16
Kupang	63,17	63,33	63,49	63,86	64,39	64,63	64,91
Timor Tengah Selatan	65,55	65,60	65,65	65,91	66,32	66,42	66,46
Timor Tengah Utara	66,09	66,14	66,19	66,45	66,86	66,96	67,09
Belu	63,01	63,21	63,42	63,81	64,35	64,61	64,89
Alor	60,23	60,35	60,47	60,8	61,29	61,48	61,64
Lembata	65,85	66,02	66,19	66,57	66,97	67,07	67,20

Wilayah	Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Flores Timur	63,28	64,36	64,45	64,7	65,10	65,20	65,31
Sikka	66,10	66,20	66,30	66,61	67,07	67,24	67,45
Ende	64,37	64,42	64,48	64,75	65,17	65,29	65,43
Ngada	67,32	67,34	67,36	67,59	67,96	68,04	68,12
Manggarai	64,48	65,66	65,84	66,23	66,77	67,03	67,11
Rote Ndao	62,86	63,13	63,41	63,8	64,34	64,60	64,88
Manggarai Barat	65,98	66,19	66,19	66,58	67,12	67,38	67,46
Sumba Tengah	67,65	67,73	67,74	67,96	68,32	68,38	68,42
Sumba Barat Daya	67,08	67,71	67,76	68,02	68,43	68,53	68,57
Nagekeo	66,25	66,31	66,36	66,62	67,03	67,13	67,25
Manggarai Timur	67,27	67,39	67,40	67,62	67,98	68,04	68,07
Sabu Raijua	58,38	58,69	59,00	59,53	60,23	60,64	60,66
Malaka	64,15	64,27	64,29	64,52	64,89	64,97	65,01
Kota Kupang	68,34	68,46	68,58	68,9	69,37	69,55	69,73
Nusa Tenggara Timur	65,96	66,04	66,07	66,38	66,85	67,01	67,15

Sumber : BPS NTT, 2022

Penyebab rendahnya UHH disebabkan oleh ketersediaan dan akses ke fasilitas kesehatan yang belum memadai, kurangnya tenaga kesehatan, kematian neonatus, tingginya angka kematian akibat penyakit menular (TBC, Malaria, HIV), tekanan darah tinggi, penggunaan tembakau dan alkohol, kematian karena kecelakaan lalu lintas. Keadaan geografis merupakan tantangan bagi pelayanan kesehatan, dimana akses dan keterjangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi terbatas. Untuk masyarakat yang tinggal pada pulau-pulau kecil, keterbatasan sarana kesehatan diperparah dengan akses transportasi laut yang sulit, bahkan tidak ada sama sekali pada musim-musim tertentu dimana keadaan laut tidak menentu. Sedangkan pada wilayah daratan, akses jalan yang terbatas membuat waktu tempuh antara fasilitas kesehatan dengan masyarakat di wilayah berbukit dan bergunung menjadi lama, sehingga dalam keadaan darurat akan sulit untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan.

2.2.6 Angka Kemiskinan

Pengentasan angka kemiskinan merupakan salah satu agenda kebijakan yang populer pada berbagai entitas pemerintahan saat ini. Dalam pengukuran kemiskinan, pendekatan yang umum digunakan yakni pendekatan moneter karena sederhana dan mudah digunakan sebagai pembandingan antar waktu dan tempat. Pendekatan ini mengukur kemiskinan berdasarkan tingkat pendapatan atau konsumsi. Garis kemiskinan, baik bersifat absolut maupun relatif, biasanya ditetapkan untuk mengidentifikasi orang miskin yang pendapatan atau konsumsinya di bawah ambang batas (*cut-off*). Garis kemiskinan internasional (absolut) yang ditetapkan oleh Bank Dunia pada Tahun 2022 adalah US\$ 2,15 per kapita per hari berdasarkan pada Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity* (PPP) Tahun 2017, menggantikan garis kemiskinan sebelumnya yakni US\$ 1,9 pada PPP 2011.

Dalam konteks Indonesia, dengan pendekatan ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan dari segi kemampuan keuangan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan berdasarkan konsumsi. Untuk mengklasifikasikan penduduk miskin dan tidak miskin, garis kemiskinan (GK) nasional yang digunakan oleh BPS adalah "representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan". Dengan demikian, penduduk miskin di Indonesia dalam ukuran moneter adalah mereka yang memiliki rata-rata konsumsi per bulan di bawah garis kemiskinan. Misalnya, berdasarkan perhitungan BPS per September 2021, Garis Kemiskinan di NTT sebesar Rp 437.606/kapita/bulan.

Tabel 2.14
Indikator Kemiskinan di Provinsi NTT Tahun 2016-2021

Indikator	Angka Kemiskinan (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	1.160,53	1.150,08	1.134,74	1.129,46	1.173,53	1.146,28
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	322.947	343.396	354.898	373.922	403.055	437.606
Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	4,69	3,83	4,16	4,13	4,15	4,79
Indeks keparahan kemiskinan (P2)	1,30	0,96	1,17	1,12	1,24	1,44
Persentase Penduduk Miskin NTT	22,58	22,01	21,38	20,62	21,21	20,44
Persentase Penduduk Miskin Indonesia	10,70	10,12	9,66	9,22	10,19	9,71

Sumber : BPS NTT, 2022. * Kerdas September 2021

Hasil potret penduduk miskin dengan metode pengukuran moneter menunjukkan bahwa terjadi tren penurunan pada sejumlah indikator kemiskinan di NTT, meski terjadi pelambatan atau stagnasi pada tahun 2020. Tabel 2.14 merincikan tren indikator - indikator yang digunakan untuk memotret fenomena kemiskinan di Provinsi NTT antara tahun 2016 dan 2021, yang mana meliputi Jumlah Penduduk Miskin, Indeks kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Persentase Penduduk Miskin.

Pada tahun 2016 (GK NTT= Rp 322.947,-), misalnya, secara absolut, penduduk miskin di NTT berjumlah 1.160,53 ribu jiwa, dengan persentase sebesar 22,58 %, sedangkan Indeks kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 4,69 poin dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 1,30 poin. Pada tahun selanjutnya, jumlah jiwa maupun persentase penduduk miskin terus menunjukkan penurunan. Namun, di tahun 2020 (GK NTT= Rp 403.055,-), terjadi kenaikan persentase maupun jumlah jiwa penduduk miskin menjadi 1.173,53 jiwa atau 21,21%, dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 4,15 poin dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 1,24 poin.

Terjadinya kenaikan angka kemiskinan baik secara persentase maupun absolut ini erat kaitannya dengan terjadinya pandemi global COVID-19, yang mana terjadi di provinsi NTT sejak bulan April 2020. Hal ini menjadi bertambah kompleks dengan terjadinya Badai Siklon Tropis Seroja pada tanggal 4 dan 5 April 2021 di sebagian besar wilayah NTT. Pandemi Covid-19 menyebabkan berbagai pembatasan sosial yang mana berdampak langsung pada lesunya aktivitas ekonomi maupun secara tidak langsung terhadap akses masyarakat ke dalam pasar tenaga kerja. Penduduk miskin, khususnya, yang dominan bekerja di sektor informal mendapatkan proporsi dampak negatif yang lebih besar tentunya. Dengan minimnya akses ke dalam pasar tenaga kerja karena berbagai pembatasan sosial, penduduk miskin mengalami penurunan pendapatan yang berimplikasi pada rendahnya konsumsi penduduk miskin. Di lain sisi, peningkatan angka kemiskinan ini disebabkan pula karena berkurangnya anggaran pengentasan kemiskinan (*pro poor budget*) yang dialihkan (*refocussing*) ke pos belanja penanganan Covid-19 maupun penanganan pasca bencana Badai Siklon Tropis Seroja. Ruang fiskal yang terbatas ini diperparah dengan realisasi pendapatan yang berkurang sebagai dampak lesunya geliat ekonomi di sektor privat.

Seiring berjalannya waktu, tantangan dalam pengentasan kemiskinan di NTT cenderung berkurang disebabkan oleh semakin terkendalinya pandemi COVID-19. Laju vaksinasi yang dikawal secara serius oleh Pemerintah mendorong optimisme masyarakat dan pelaku usaha. Implikasinya, mobilitas dalam aktivitas ekonomi kembali terjadi sehingga masyarakat miskin kembali mendapat akses ke dalam pasar tenaga kerja maupun mendapat intervensi kebijakan *pro-poor* yang semakin membaik. Hal ini terefleksi melalui tren penurunan angka kemiskinan pada tahun 2021 (GK NTT= Rp 437.606,-), dimana jumlah penduduk miskin telah turun menjadi 1.146,28 jiwa atau sebesar 20,44%, dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 4,79 poin dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 1,44 poin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Meski demikian, capaian akhir masing-masing indikator kemiskinan pada Tabel 2.14 tentu perlu menjadi perhatian serius segenap pemangku kepentingan ke depan. Kinerja pengentasan kemiskinan masih belum cukup signifikan jika dibanding dengan rata-rata nasional, sebagaimana tampak pada persentase penduduk miskin NTT di tahun 2021 yang masih sebesar 20,44 % sedangkan rata-rata nasional telah berada pada angka 9,71%. Untuk itu, akselerasi trend penurunan kemiskinan perlu ditingkatkan lagi ke depan.

Berdasarkan arahan dari Presiden dalam Rapat terbatas strategi percepatan pengentasan kemiskinan agar kemiskinan ekstrem (*extreme poverty*) pada 2024 dapat mencapai 0% dengan melakukan validasi data yang mencakup mencakup nama (*by name*) dan lokasi (*by address*). Berdasarkan Pedoman Umum Kemiskinan Ekstrem, miskin ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, Kesehatan, tempat tinggal, Pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan tetapi juga akses pada layanan sosial. Kemiskinan Ekstrem diukur

menggunakan "absolute poverty measure" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Secara internasional, kemiskinan ekstrem adalah masyarakat yang memiliki pendapatan kurang dari US \$ 1,9 PPP (*purchasing power parities*). Purchasing Power Parities (PPP) adalah indeks harga internasional yang diukur dengan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli sekeranjang barang yang sama di setiap negara yang dilakukan pembandingan dengan menggunakan US \$. Contoh konsep Purchasing Power Parities (PPP), jika harga satu buah pisang di USA adalah US \$ 1.00, sedangkan di Indonesia adalah Rp 500, maka Purchasing Power Parities (PPP) tersebut adalah US \$ 0,002/Rupiah. Pada tahun 2022, nilai US \$ 1,9 PPP = Rp 10.739 per kapita per hari atau Rp.322.170 per kapita per bulan.

Untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem pada Tahun 2021 intervensi kemiskinan ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan pada 5 (lima) Kabupaten yaitu Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pada tahun 2022 intervensi kemiskinan ekstrem diperluas menjadi 18 kabupaten/kota di Provinsi NTT (minus kabupaten Flores Timur, Sikka, Nagekeo dan Ngada) dan pada tahun 2023 intervensi diperluas lagi menjadi 22 kabupaten/kota.

Berdasarkan rangkuman hasil estimasi BPS 2022 di Provinsi NTT mengalami peningkatan tingkat kemiskinan ekstrem dari 6,44% (Maret 2021) menjadi 6,56% (Maret 2022) dan Dari 22 kabupaten/kota, terdapat 11 kabupaten yang mengalami penurunan dan 11 kab/kota yang mengalami peningkatan kemiskinan ekstrem.

Tabel 2.15
Estimasi Kemiskinan Ekstrem di NTT Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2021-2022

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Estimasi Penduduk Miskin Ekstrem(%)		Estimasi Penduduk Miskin Ekstrem (ribu jiwa)	
	2021	2022	2021	2022
Sumba Barat	13,73	11,75	18.280	15.854
Sumba Timur	15,14	10,40	39.957	27.735
Kupang	5,72	5,98	22.729	24.275
Timor Tengah Selatan	6,56	13,01	30.959	61.574
Timor Tengah Utara	4,84	2,48	12.480	6.435
Belu	5,35	4,44	12.077	10.170
Alor	2,77	2,38	5.749	4.977
Lembata	9,90	7,98	14.635	12.010
Flores Timur	0,79	2,10	2.060	5.491

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Estimasi Penduduk Miskin Ekstrem(%)		Estimasi Penduduk Miskin Ekstrem (ribu jiwa)	
	2021	2022	2021	2022
Sikka	0,42	2,57	1.358	8.320
Ende	13,00	10,99	35.764	30.291
Ngada	5,32	2,98	8.881	5.037
Manggarai	9,35	6,64	32.424	23.328
Rote Ndao	9,22	9,62	16.983	18.382
Manggarai Barat	6,98	9,79	19.906	28.515
Sumba Tengah	18,79	19,11	13.972	14.395
Sumba Barat Daya	6,91	4,63	24.622	16.800
Nagekeo	1,35	1,47	2.002	2.200
Manggarai Timur	6,85	9,11	19.936	26.781
Sabu Raijua	16,16	8,79	16.418	9.173
Malaka	3,06	3,54	6.035	7.071
Kota Kupang	0,38	2,49	1.724	11.640
Nusa Tenggara Timur	6,44	6,56	358.951	370.456

Sumber : estimasi BPS, 2022

Hasil pembelajaran Intervensi penanggulangan kemiskinan ekstrem Tahap I, upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem membutuhkan data yang akurat dan terkini untuk menetapkan sasaran program intervensi. Oleh karena itu dengan memperhatikan arahan Presiden dan masukan Wakil Presiden pada Ratas Data Kemiskinan Ekstrem pada 15 Februari 2022, telah dilakukan penyiapan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dibawah koordinasi Kemenko PMK, dengan kolaborasi bersama BKKBN, Kemendagri, BPS, dan Set TNP2K. Data P3KE adalah subset dari Data PKBKKBN 2021 yang telah diberikan rangking dan divalidasi dengan Data NIK oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Data Pendataan Keluarga (PK) BKKBN 2021 merupakan data *set by name-by address* (BNBA) yang memiliki informasi karakteristik sosial-ekonomi keluarga yang dapat digunakan sebagai alternatif pengembangan peringkat kesejahteraan sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok miskin ekstrem. Dengan informasi sosial-ekonomi keluarga dan rangking kesejahteraan serta relatif barunya waktu pengumpulan data, menjadikan data PK BKKBN bermanfaat untuk memperbaiki pensasaran program pengurangan beban. Selain itu, karena cakupannya yang sangat besar data ini dapat dimanfaatkan untuk pensasaran program peningkatan pendapatan dan pemberdayaan.

Berdasarkan data P3KE di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 167.027 Keluarga atau 968.502 ribu jiwa masuk sebagai Kelompok Desil 1 (status kesejahteraan 10% terendah), yang harus diprioritaskan sebagai sasaran intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masuk pada kelompok desil 1 tersebar di 22 kabupaten/kota, dengan jumlah terbanyak terdapat di Kabupaten Sumba Barat Daya (16.361 KK atau 99.889) dan di Kabupaten Manggarai Timur (16.111 KK atau 87.139 jiwa).



Gambar 2.8
Peta Sebaran Desil 1 Penduduk Miskin Ekstrem Provinsi NTT,
Menurut Kabupaten/Kota, 2022

2.2.7 Status Kesehatan

2.2.7.1 Status Gizi

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang, dan kedua faktor penyebab ini dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari standar nasional yang berlaku. Standar dimaksud terdapat pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan beberapa dokumen lainnya.

Ibu hamil dengan konsumsi asupan gizi yang rendah dan mengalami penyakit infeksi akan melahirkan bayi dengan Berat Lahir Rendah (BBLR), dan/atau panjang badan bayi di bawah standar. Asupan gizi yang baik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga tetapi juga dipengaruhi oleh pola asuh seperti pemberian kolostrum (ASI yang pertama kali keluar), Inisiasi Menyusu Dini (IMD), pemberian ASI eksklusif, dan pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) secara tepat. Selain itu, faktor kesehatan lingkungan seperti akses air bersih dan sanitasi layak serta pengelolaan sampah juga berhubungan erat dengan kejadian infeksi penyakit menular pada anak. Kehidupan anak sejak dalam kandungan ibu hingga berusia dua tahun (1.000 HPK) merupakan masa-masa kritis dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. Faktor lingkungan yang baik, terutama di awal-awal kehidupan anak, dapat memaksimalkan potensi genetik (keturunan) yang dimiliki anak sehingga anak dapat mencapai tinggi badan optimalnya. Faktor lingkungan yang mendukung ditentukan oleh berbagai aspek atau sektor.

Menurut pencatatan e-PPBGM, terlihat ada kecenderungan penurunan prosentase balita stunting di wilayah NTT sejak tahun 2018; menurun dari 35,8% di tahun 2018 menjadi 17,7% di tahun 2022. Angka ini berada jauh di bawah rerata Nasional dan NTT (Risksedas 2018) yang mencapai 30,8% dan 42,6%. Sementara itu prosentase balita yang mengalami wasting dan underweight cenderung fluktuatif sejak tahun 2018. Namun, pergerakan fluktuatif prosentase balita yang mengalami underweight dari tahun 2018-2022 justru masih jauh di atas prosentase nasional yang hanya 17,7 di tahun 2018 (Risksedas 2018).

Tabel 2.16
Status Gizi Balita di NTT Tahun 2018-2022

Indikator	Persentase (e-PPBGM)					Risksedas (NTT)	Risksedas (Nasional)
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2018
Stunting (%)	35,4	30,1	24,2	20,9	17,7	42,6	30,8
Wasting (%)	8,3	9,4	7,5	8,0	8,5	12,8	10,2
Underweight (%)	19,6	19,9	18,0	18,3	23,0	29,6	17,7

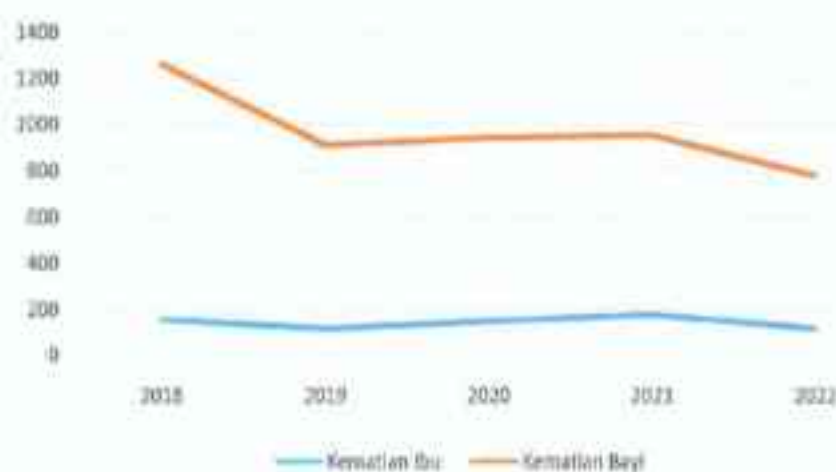
Sumber : Profil Kesehatan NTT Tahun 2021 Dinas Kesehatan Provinsi NTT, akses Oktober 2022; Risksedas 2018 Kementerian Kesehatan RI

2.2.7.2 Angka Kematian Ibu dan Bayi

Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) merupakan salah satu indikator utama menilai tingkat kesejahteraan dan status kesehatan masyarakat.

Sejak tahun 2018, jumlah kasus kematian Ibu di wilayah Provinsi NTT bersifat fluktuatif dengan jumlah >150 kasus setiap tahunnya kecuali pada tahun 2019. Penyebab Utama kematian Ibu: Perdarahan (42%), Eklamsi (14%), Infeksi (5%), Gangguan Metabolisme (4%) dan masalah lainnya termasuk masalah sosial, budaya dan ekonomi masyarakat (35%). Kabupaten dengan jumlah kematian ibu tertinggi (selalu muncul dalam lima (5) tahun terakhir): Timor Tengah Selatan, Kupang, Manggarai Timur, Manggarai, Sumba Barat Daya dan Sumba Timur.

Sebaliknya, jumlah kasus kematian bayi di wilayah Provinsi NTT mencapai 1265 kasus pada tahun 2018 dan turun pada tahun 2019 lalu relatif sedikit bertambah setiap tahunnya berturut-turut pada tahun 2020 dan 2021. Penyebab Utama Kematian Bayi: Asfiksia (27%), BBLR (18%), kelainan bawaan (8%), Pneumonia (7%), gangguan lainnya (6%), masalah sosial, budaya dan ekonomi masyarakat (34%). Kabupaten dengan jumlah kematian bayi tertinggi (selalu muncul dalam lima (5) tahun terakhir): Timor Tengah Selatan, Manggarai, Manggarai Barat, Kupang, Sikka, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Timor Tengah Utara



Indikator	Jumlah Kasus				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kematian Ibu	158	118	151	181	120 (Okt)
Kematian Bayi	1265	913	943	955	781 (Okt)

Sumber : Profil kesehatan NTT Tahun 2021 Data Kesehatan Provinsi NTT, akses Oktober 2022

Gambar 2.8
Kasus Kematian Ibu dan Bayi di NTT
Tahun 2018-2022

Tabel 2.17
Kasus Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten/Kota di Wilayah NTT
Tahun 2018-2022

NO	KAB/KOTA	AKI TAHUN					AKB TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Kupang	8	4	4	8	8	35	18	16	22	46
2	Kupang	11	5	11	15	8	86	73	78	96	81
3	TIS	24	12	17	17	7	144	86	109	100	45
4	TTU	6	3	7	11	11	74	54	43	33	43
5	Belu	10	5	12	7	6	62	80	66	52	35
6	Alor	12	7	7	10	8	25	16	9	17	13
7	Lembata	1	0	5	4	0	25	29	23	21	12
8	Flores Timur	9	3	5	6	7	100	49	29	45	37
9	Sikka	10	12	7	9	7	80	55	45	51	53
10	Ende	8	8	10	7	6	47	35	67	23	28
11	Nagekeo	4	1	4	2	1	36	25	24	28	16
12	Ngada	2	1	0	1	1	36	15	23	12	26
13	Manggarai Timur	9	10	12	11	17	119	51	48	49	41
14	Manggarai	6	12	5	12	5	83	76	85	96	81
15	Manggarai Barat	7	5	7	7	6	109	43	52	67	57
16	Sumba Barat Daya	5	10	9	14	5	34	25	32	42	56
17	Sumba Barat	1	1	1	3	2	15	22	14	29	42
18	Sumba Tengah	3	0	2	3	2	18	18	40	24	26
19	Sumba Timur	7	8	10	10	10	45	58	46	19	41
20	Rote Ndao	4	5	5	10	2	32	46	42	59	7
21	Sabu Raijua	3	1	8	9	5	44	10	37	55	25
22	Malaka	8	5	3	5	5	16	29	15	15	16
	NTT	158	118	151	181	129	1265	913	943	955	827

Sumber : Profil Kesehatan NTT Tahun 2021 Dinas Kesehatan Provinsi NTT, akses Oktober 2022

2.2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

Sejalan dengan mulai bangkitnya secara perlahan ekonomi di tahun 2021, TPT Provinsi NTT pada tahun 2021 tercatat 3,77%, mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 4,28%. Secara spasial, TPT Provinsi NTT Agustus 2021 menempati peringkat ke-tujuh sebagai provinsi dengan TPT terendah setelah Provinsi Sulawesi Tengah (3,75%), Bengkulu (3,65%), Papua (3,33%), Sulawesi Barat (3,13%), Gorontalo (3,01% dan Nusa Tenggara Barat (3,01%). Sehingga secara Nasional, kondisi TPT Provinsi NTT pada Agustus 2021 lebih baik dibandingkan Nasional yang sebesar 6,49%.

Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Provinsi NTT pada Agustus 2021 menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2020. TPAK pada Agustus 2021 tercatat sebesar 73,78% atau lebih tinggi dibandingkan Agustus 2020 yang sebesar 70,11%.

2.2.9 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah NTT menunjukkan perbaikan. Tahun 2016-2021 secara berturut-turut pengelolaan keuangan daerah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan tahun 2013-2015 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Tabel 2.18
Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah di Provinsi NTT Tahun 2013-2021

Indikator	Tahun								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, 2020

2.2.10 Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan. Tujuan utama penyusunan PPH adalah untuk membuat suatu rasionalisasi pola konsumsi pangan yang dianjurkan, yang terdiri dari kombinasi aneka ragam pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan sesuai cita rasa. Skor PPH di NTT terus membaik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 PPH NTT 66,20 meningkat tahun 2016 menjadi 73,00 namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 67,9 persen.

Tabel 2.19
Skor Pola Pangan Harapan di Provinsi NTT Tahun 2013-2020

Indikator	Tahun (%)							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Skor PPH	66,2	65,0	71,3	73,0	78,6	69,0	69,2	67,9

Sumber : Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, 2021

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 Pendidikan

2.3.1.1 Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

Selanjutnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi NTT pada Umur 16-18 Tahun menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2018 sebesar 74,83, menjadi sebesar 75,04 pada Tahun 2019. Namun pada tahun 2020 menurun menjadi 74,92 dan APS tahun 2021 meningkat kembali menjadi sebesar 75,77 selengkapanya sebagaimana Tabel 2.20.

Tabel 2.20
Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur 15-18 Tahun per Kabupaten/Kota (%)/Tahun 2019-2021

Wilayah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Umur 16-18 Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Sumba Barat	77.27	79.47	78.93	80.06
Sumba Timur	70.17	71.06	70.00	70.87
Kupang	78.76	80.17	80.86	80.94
Timor Tengah Selatan	68.34	70.79	71.29	71.58
Timor Tengah Utara	74.37	73.56	74.05	74.33
Belu	59.30	60.35	61.93	61.59
Alor	67.66	67.51	67.42	67.10
Lembata	70.78	70.53	70.88	70.42
Flores Timur	71.52	72.15	72.51	73.06
Sikka	71.11	71.33	73.31	74.53
Ende	74.36	74.01	76.41	76.50
Ngada	65.55	65.86	66.18	66.72
Manggarai	82.85	82.11	81.95	82.23
Rote Ndao	76.90	76.66	75.51	75.76
Manggarai Barat	74.72	73.98	73.48	74.84
Sumba Tengah	78.57	77.66	75.65	78.25

Wilayah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Umur 16-18 Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Sumba Barat Daya	74.11	73.28	72.99	73.12
Nagekeo	70.80	71.48	67.38	72.47
Manggarai Timur	75.92	75.66	74.44	77.58
Sabu Raijua	80.98	80.61	81.17	81.00
Malaka	77.68	76.12	74.07	77.39
Kota Kupang	89.11	89.57	88.74	89.32
Nusa Tenggara Timur	74.83	75.04	74.92	75.77

Sumber: BPS, Tahun 2022

Fenomena kenaikan dan penurunan APS antara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 terjadi karena jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang SMA/SMK relatif tidak sama, putus sekolah dan tingkat kelulusan serta adanya perubahan regulasi terkait pengalihan kewenangan terhadap pelaksanaan pendidikan menengah atas dari Kabupaten/Kota ke Provinsi NTT.

Selain itu juga, faktor - faktor yang mempengaruhi Tingkat APS antara lain (1) faktor pendidikan orang dewasa, (2) faktor ekonomi (pengeluaran untuk pendidikan), (3) faktor guru (rasio murid terhadap guru) dan (4) faktor jumlah sekolah (rasio murid terhadap sekolah).

Pada kelompok umur yang lebih tinggi, partisipasi sekolah penduduk Nusa Tenggara Timur menunjukkan kecenderungan penurunan. Jika pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun partisipasi sekolah berada di atas 90 persen, maka pada kelompok penduduk 16-18 tahun hanya sekitar 75 persen dari total penduduk berumur 16-18 persen. Hal ini berarti hanya ada tiga dari empat orang penduduk berumur 16-18 tahun yang sementara bersekolah. Menurut jenis kelamin, terlihat adanya pola yang sama dengan partisipasi sekolah umur yang lebih muda. Partisipasi penduduk perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki pada kelompok umur 16-18 tahun.

Masih ada satu di antara empat orang yang telah meninggalkan bangku sekolah pada kelompok umur ini. Upaya bersama diarahkan untuk memperkecil berbagai hambatan dalam mengakses fasilitas pendidikan. Program wajib belajar yang selama ini terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi sekolah terutama pada pendidikan dasar dan menengah.

Pentingnya peningkatan APS untuk mendukung pencapaian rata-rata lama sekolah lebih tinggi yang dicapai tahun 2021. Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator kunci yang menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2.3.1.2 Rasio Murid/Guru

Rasio Murid dan Guru adalah Perbandingan antara jumlah Guru pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah Murid. kegunaannya adalah untuk menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar; melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.

Rasio Murid dan Guru SMA di NTT adalah 14 berbanding 1 yang mana masih tergolong ideal sehingga rasio Guru dan Murid di Provinsi NTT bukan merupakan salah satu masalah pendidikan. Akan tetapi penyebaran Guru di NTT tersebut tidak merata di 22 Kabupaten/Kota, dan rasio guru mata pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia masih terbatas.

Tabel 2.21
Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Ratio Murid-Guru
Sekolah Menengah Atas (SMA)

Wilayah	Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas (SMA)											
	Sekolah			Murid			Guru			Ratio Murid Guru		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Sumba Barat	8	8	9	5572	5442	5327	280	284	302	20	19	18
Sumba Timur	21	21	23	11536	11944	12447	673	657	670	17	18	19
Kupang	58	59	62	15561	15547	15715	1287	12827	1332	12	12	12
Timor Tengah Selatan	43	47	53	15872	16404	16912	970	985	1036	16	17	16
Timor Tengah Utara	30	30	30	9670	9851	10145	728	722	709	13	14	14
Belu	25	25	25	9318	9414	9380	626	659	659	15	14	14
Alor	35	21	21	7176	6891	7108	772	790	810	9	9	9
Lembata	15	14	14	4307	4214	4336	303	330	346	14	13	13
Flores Timur	23	23	24	8076	7992	8101	630	645	667	13	12	12
Sikka	23	23	24	9809	9200	8960	655	654	664	15	14	13
Ende	21	3536	36	8062	7606	7396	633	654	644	13	12	11
Ngada	13	16	18	6039	6071	6260	389	413	465	16	15	13
Manggarai	26	27	27	14819	14014	14583	826	835	860	18	17	17
Rote Ndao	13	13	14	6010	6298	6665	377	375	392	16	17	17
Manggarai Barat	27	28	31	8981	8608	8691	654	689	769	14	12	11
Sumba	4	4	5	2610	2735	2772	138	150	161	19	18	17

Wilayah	Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas (SMA)											
	Sekolah			Murid			Guru			Rasio Murid Guru		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Tengah												
Sumba Barat Daya	26	26	27	10880	10907	11490	597	579	655	18	19	18
Nagasaki	15	15	15	5486	5517	5354	417	429	436	13	13	12
Manggarai Timur	47	46	46	10611	9962	9762	977	993	1015	11	10	10
Sabu Raijua	7	8	8	4531	4934	5327	222	252	262	20	20	20
Malaka	32	32	34	8994	8620	8587	722	747	776	12	12	11
Kota Kupang	41	41	42	16314	15762	15645	1208	1200	1199	14	13	13
Nusa Tenggara Timur	553	562	588	200234	197923	200963	14084	14329	14829	14	13	14

Sumber: <https://snp.kemendikbud.go.id/jef>

2.3.2 Kesehatan

2.3.2.1 Sarana Kesehatan

Sampai dengan Tahun 2021 terdapat 56 Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota. Data fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis fasilitas di 21 Kabupaten/Kota Tahun 2018-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22
Jumlah Fasilitas Kesehatan menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2018-2021

Kabupaten	Fasilitas Kesehatan															
	Rumah Sakit				Poliklinik				Puskesmas				Pelayanan			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Sumba Barat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sumba Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kupang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tengah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tengah Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tengah Utara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Batu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Alor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Lembata	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Raja Tolu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sikka	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ende	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kupang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Manggarai	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rote Ndao	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Manggarai Barat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sumba Tengah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sumba Barat Daya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ngada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Manggarai Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Selu Rote	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Malaka	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kota Kupang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nusa Tenggara Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Sumber Data:

1. Profil Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2018 & 2019
2. Profil Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi NTT Tahun 2018 & 2019
3. Data Berekam Penderita Penyakit: Data Kesehatan, Epidemiologi & Penyakit (Dep. Provinsi NTT)

2.3.2.2 Tenaga Kesehatan

Sumber Daya Manusia Kesehatan merupakan salah satu bagian penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di Indonesia. Tenaga Kesehatan merupakan ujung tombak dalam pelayanan kesehatan baik preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Ketersediaan tenaga kesehatan juga merupakan salah satu indikator dalam pembangunan kesehatan. Ketersediaan tenaga kesehatan tahun 2017-2021 sebagaimana Tabel 2.23:

Tabel 2.23
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)
Di Provinsi NTT Tahun 2017-2021

Wilayah	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)														
	Tenaga Medis			Tenaga Keperawatan			Tenaga Kebidanan			Tenaga Kefarmasian			Tenaga Kesehatan Lainnya		
	2017	2018	2021	2017	2018	2021	2017	2018	2021	2017	2018	2021	2017	2018	2021
Sumba Barat	50	43	32	312	318	381	58	78	122	18	22	18	47	21	32
Sumba Timur	23	65	58	404	571	637	190	292	348	22	17	38	-	22	40
Kupang	13	43	46	169	268	474	293	301	675	20	34	35	-	33	79
Timor Tengah Selatan	61	54	68	205	227	528	199	319	596	26	26	59	-	44	87
Timor Tengah Utara	29	76	54	306	294	506	304	306	612	66	63	80	-	40	73
Belu	86	86	46	555	700	493	263	197	258	60	64	50	-	47	48
Alor	18	42	81	906	292	656	394	221	497	35	54	91	-	21	88
Lembata	26	30	28	318	189	251	278	283	322	11	35	39	-	30	37
Flores Timur	37	35	54	366	458	700	310	350	693	50	46	71	-	29	59
Sikka	13	99	51	300	463	692	325	364	587	42	52	62	-	38	54
Ende	26	58	38	416	463	789	292	297	711	36	44	77	-	18	33
Rapla	20	44	52	247	226	570	110	103	486	30	36	59	-	11	45
Manggarai	17	71	45	693	790	880	596	549	904	52	43	84	-	45	72
Rote Ndao	15	20	51	107	62	264	92	89	245	24	24	37	-	12	45
Manggarai Barat	28	38	46	320	380	562	236	286	537	30	36	53	-	41	73
Sumba Tengah	17	19	20	219	256	267	9	118	128	14	44	12	-	18	21
Sumba Barat Daya	34	46	11	382	440	76	132	60	26	35	19	8	-	15	5
Nagekeo	20	27	34	257	243	306	232	218	359	28	21	29	-	11	39
Manggarai Timur	9	9	28	683	822	873	273	694	783	27	41	60	-	41	80
Satu Raijua	9	20	19	123	161	201	127	144	186	5	11	24	-	15	37
Malaka	41	53	48	329	378	353	274	302	289	69	49	41	-	44	48
Kota Kupang	44	469	123	291	1280	775	189	522	381	30	73	122	-	67	80
Nusa Tenggara Timur	626	1447	1043	7596	9481	11246	5176	6083	9742	727	854	1169	47	666	1185

Sumber: DPS, Tahun 2022

2.3.3 Pekerjaan Umum

2.3.3.1 Jalan dan Jembatan

Total panjang jalan yang menjadi kewenangan provinsi adalah 2.650 km. Panjang capaian jalan mantap pada akhir tahun 2019 adalah 1.743,88 km dan tidak mantap sepanjang 906,12 km. Pada periode tahun anggaran 2019 hingga 2022 telah dilakukan pencapaian kondisi jalan mantap sepanjang 884,24 km. Ini artinya beban jalan mantap kewenangan provinsi yang akan diselesaikan sampai akhir periode tahun 2023 adalah sepanjang 21,78 km. Melalui dukungan dari anggaran pemerintah provinsi dan sumber-sumber pembiayaan sah lainnya, ditargetkan pada akhir periode tahun anggaran 2023, kondisi jalan kewenangan provinsi sudah 100 persen menjadi jalan mantap.

Total panjang jalan menuju destinasi wisata adalah 542,87 km. Data eksisting tahun 2018 untuk penanganan ruas jalan ke destinasi wisata adalah 64 km dan realisasi penanganan sampai dengan 2020 adalah 165,95 km. Rencana penanganan tahun 2021 adalah 171,51 km yang merupakan paket-paket kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana pinjaman daerah melalui PT. SMI, baik lanjutan tahun 2020 maupun paket 2021. Realisasi pelaksanaan seluruhnya pada tahun 2021 adalah 36,64 km dari pelaksanaan paket-paket lanjutan PT. SMI tahun 2020. Dengan demikian capaian sampai dengan 2021 adalah sebesar 202,59 km.

Tabel 2.24 di bawah berikut adalah tabel ruas jalan kewenangan provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur NTT 256/KEP/HK tahun 2017 yang tersebar pada 21 wilayah kabupaten dan kota Nusa Tenggara Timur.

Tabel 2.24
Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan (km)
Tahun 2018-2020

Wilayah	Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan (km)											
	Baik			Sedang			Rusak			Rusak Berat		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Domba Barat	58,72	50,00	61,24	2,47	10,26	10,26	2,00	2,53	2,53	24,08	24,91	13,67
Domba Timur	96,31	111,16	10,96	32,80	19,09	28,47	20,00	14,37	10,37	121,84	129,73	125,88
Kapang	160,97	164,37	21,00	23,41	11,21	11,21	53,00	45,60	38,90	108,22	126,33	87,37
Timor Tengah Selatan	165,18	172,56	174,71	5,79	4,50	4,50	6,00	5,85	3,65	118,23	111,85	111,90

Wilayah	Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan (km)											
	Baik			Sedang			Buruk			Buruk Berat		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Timor Tengah Utara	128.56	124.36	124.36	3.20	7.40	7.40	0.65	0.65	0.65	0.60	0.60	0.60
Belu	56.32	54.72	54.72	3.90	7.70	7.70	0.60	0.60	0.60	0.40	0.40	0.40
Alor	31.86	27.79	37.82	9.20	8.73	12.34	35.00	25.68	32.64	47.66	61.62	41.33
Lembata	18.26	22.30	37.26	4.36	0.00	0.00	-	0.00	0.00	16.38	16.70	1.72
Flora Timur	89.54	104.29	102.91	13.31	4.65	54.00	10.00	11.00	10.90	34.74	29.86	30.68
Sikka	56.50	72.88	72.88	8.25	4.80	48.00	4.00	0.60	0.60	11.89	12.06	12.06
Ende	105.59	82.54	86.28	15.25	30.20	30.20	6.00	14.53	14.23	19.24	18.89	15.45
Ngada	115.61	104.34	115.94	3.80	25.96	25.96	32.00	27.63	27.03	47.85	41.31	30.31
Manggarai	56.71	65.05	56.20	21.80	12.00	18.60	12.00	7.40	14.30	7.79	13.65	9.00
Kota Ndau	23.01	23.41	23.41	5.00	4.60	4.60	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Manggarai Barat	29.91	61.31	60.88	19.74	24.00	10.80	21.00	28.80	29.90	72.65	27.69	40.22
Sumba Tengah	18.58	18.30	18.30	5.10	1.50	1.50	2.00	1.20	1.20	0.80	5.45	5.45
Sumba Barat Daya	76.37	67.45	67.45	-	6.14	6.14	0.07	3.20	3.20	6.23	6.28	6.28
Nagekeo	53.80	53.62	59.69	4.20	4.20	4.20	7.00	6.20	6.20	11.37	11.34	5.27
Manggarai Timur	34.70	31.40	39.80	17.60	6.60	8.40	6.00	5.80	6.40	54.90	49.20	38.40
Sabu Raijua	17.60	18.29	33.69	5.00	5.65	4.10	9.00	6.70	5.41	7.20	8.36	5.80
Malaka	64.15	64.38	64.38	3.00	2.00	2.00	0.55	1.55	1.55	0.20	0.00	0.00
Kota Kupang	26.72	25.73	28.07	1.00	2.34	0.00	-	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00
Nusa Tenggara Timur	1497.58	1540.35	1649.36	211.10	303.54	308.58	228.65	209.89	210.26	712.67	696.23	581.80

Sumber: Dinas PUPR Provinsi NTT, 2021

Sedangkan untuk Jembatan, sampai dengan tahun 2020, panjang Jembatan, jumlah ruas dan banyaknya Jembatan Provinsi menurut Kabupaten/Kota, sebagaimana Tabel 2.25 berikut ini:

Tabel 2.25
Rekapitulasi Jembatan Provinsi Pada Ruas Jalan Provinsi Tahun 2020

NO	LOKASI PULAU/KAB/KOTA	SEMULA			MENJADI		
		PANJANG JEMBATAN	JUMLAH RUAS	BANYAKNYA JEMBATAN	PANJANG JEMBATAN (M)	JUMLAH RUAS	BANYAKNYA JEMBATAN
1	Kabupaten Alor	331	2	26	331	2	26
2	Kabupaten Lembata	63	1	5	-	-	-
3	Kabupaten Flores	163	2	14	163	2	14
4	Kabupaten Sikka	341	7	27	341	7	27
5	Kabupaten Ende	699	6	31	699	6	31
6	Kabupaten Nagekeo	113	2	10	66	1	6
7	Kabupaten Ngada	840	9	40	840	9	40
8	Kabupaten Manggarai Timur	184	1	15	184	1	15
9	Kabupaten Manggarai	1.005	4	34	763	3	19
10	Kabupaten Manggarai Barat	75	1	3	75	1	3
11	Kabupaten Sumba Timur	1.117	8	61	344	3	28

NO	LOKASI PULAU/KAB/KOTA	SEKULA			MENJADI		
		PANJANG JEMBATAN	JUMLAH RUAS	BANYAKNYA JEMBATAN	PANJANG JEMBATAN (M)	JUMLAH RUAS	BANYAKNYA JEMBATAN
12	Kabupaten Sumba Tengah	38	1	6	38	1	6
13	Kabupaten Sumba Barat	107	2	4	107	2	4
14	Kabupaten Sumba Barat Daya	107	1	7	107	1	7
15	Kota Kupang	-	-	-	-	-	-
16	Kabupaten Kupang	1.272	5	69	1.272	5	69
17	Kabupaten TTS	970	7	37	970	7	37
18	Kabupaten TTU	909	4	53	909	4	53
19	Kabupaten Belu	1.110	6	57	1.110	6	57
20	Kabupaten Rote Ndao	252	3	24	-	-	-
21	Kabupaten Sabu Raijua	-	-	-	-	-	-
	Nusa Tenggara Timur	9.692	72	523	8.315	61	442

Sumber: Dinas PUPR Provinsi NTT, 2021

2.3.3.2 Sumber Daya Air (Jaringan Irigasi, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya)

Dari penanganan yang dilakukan tahun anggaran 2022 melalui rehabilitasi jaringan irigasi di beberapa Daerah Irigasi, hingga Oktober 2022 terealisasi melayani luasan sawah 2.500 ha. Pencapaian penanganan (layanan) sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 34.268,08 ha. Total pencapaian layanan 36.768,08 ha atau sebesar 61 % dari total luas Daerah irigasi Kewenangan Provinsi yakni 60.328 Ha.

Tabel 2.26
Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi di Nusa Tenggara Timur

NO	Kabupaten/Kota Nama Daerah Irigasi	Jumlah D.I	Luasan (Ha)	Lokasi
I	KABUPATEN KUPANG	3	3.521	
1	Daerah Irigasi Enorain	1	1.100	Desa Enorain di Kecamatan Amarasi Timur
2	Daerah Irigasi Kolidoki	1	1.071	Desa Naibonat di Kecamatan Kupang Timur
3	Daerah Irigasi Netemnanu	1	1.350	Desa Netemnanu di Kecamatan Amfoang Timur
II	KABUPATEN TTS	2	1.489	
1	Daerah Irigasi Batu Putih/Oebobo	1	400	Desa Batu Putih di Kecamatan Batu Putih
2	Daerah Irigasi Oebelo	1	1.089	Desa Oebelo di Kecamatan Amanuban Selatan
III	KABUPATEN TTU	4	5.702	
1	Daerah Irigasi Ponu	1	1.430	Desa Ponu di Kecamatan Biboki Anleu
2	Daerah Irigasi Aroidi	1	1.242	Desa Oninbesi di Kecamatan Biboki Tengah
3	Daerah Irigasi Hasfuik		1.600	Desa Nonat Batan di Kecamatan Biboki Anleu
4	Daerah Irigasi Biluana	1	1.430	Desa Patutasu di Kecamatan Miomaffo Barat

NO	Kabupaten/Kota Nama Daerah Irigasi	Jumlah D.I	Luasan (Ha)	Lokasi
IV	KABUPATEN BELU	3	4.815	
1	Daerah Irigasi Fatubesi	1	1.650	Desa Fatubesi di Kecamatan Tasifeto Timur
2	Daerah Irigasi Maubusa	1	1.350	Desa Dafala di Kecamatan Tasifeto Timur
3	Daerah Irigasi Obor	1	1.815	Desa Leon Tolu di Kecamatan Raimanuk
V	KABUPATEN MALAKA	2	2.650	
1	Daerah Irigasi Alas	1	1.650	Desa Alas di Kecamatan Kobalima
2	Daerah Irigasi Weliman	1	1.000	Desa Naas di Kecamatan Malaka Barat
VI	KABUPATEN ROTE NDAO	1	1.250	
1	Daerah Irigasi Manubulu	1	1.250	Desa Edalode di Kecamatan Pante Baru
V	KABUPATEN LEMBATA	1	1.350	
1	Daerah Irigasi Wai Matan Boto	1	1.350	Desa Labalimut di Kecamatan Nagawutung
VI	KABUPATEN FLORES TIMUR	3	3.630	
1	Daerah Irigasi Konga	1	1.100	Desa Konga di Kecamatan Wulanggitang
2	Daerah Irigasi Wackelak	1	1.080	Desa Bandoni di Kecamatan Tanjung Bunga
3	Daerah Irigasi Waiwadan	1	1.450	Desa Waiwadan di Kecamatan Adonara Barat
VII	KABUPATEN SIKKA	1	1.250	
1	Daerah Irigasi Kolisia	1	1.250	Desa Kolisia B di Kecamatan Magepanda
VIII	KABUPATEN NAGEKEO	1	1.000	
1	Daerah Irigasi Malawitu	1	1.000	Desa Olekile di Kecamatan Bauwae
IX	KABUPATEN NGADA	4	4.544	
1	Daerah Irigasi Ganggong	1	1.000	Desa Rawang Kalo di Kecamatan Riung
2	Daerah Irigasi Liwur Weton	1	1.000	Desa Wolomese di Kecamatan Riung
3	Daerah Irigasi Malatiwa	1	1.344	Desa Uluwae di Kecamatan Bajawa Utara
4	Daerah Irigasi Nuakua	1	1.200	Desa Wue di Kecamatan Wolomese
X	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	2	2.029	
1	Daerah Irigasi Wae Mokei I, II	1	1.007	Desa Watungene di Kecamatan Kota Komba
2	Daerah Irigasi Wacrana	1	1.022	Desa Watu Pari di Kecamatan Kota Komba
XI	KABUPATEN MANGGARAI	4	8.275	
1	Daerah Irigasi Cancar	1	2.500	Desa Donglale di Kecamatan Ruteng
2	Daerah Irigasi Golowoi	1	1.500	Desa Golowoi di Kecamatan Cibai Barat
3	Daerah Irigasi Satar Lenda	1	1.525	Desa Satar Lenda di Kecamatan Satar Mese Barat
4	Daerah Irigasi Wae Ces I - V	1	2.750	Desa Karot di Kecamatan Langke Rebong
XII	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	4	4.731	
1	Daerah Irigasi Wae Ganggang	1	1.281	Desa Nanga Kantor di Kecamatan Macang Pacar

NO	Kabupaten/Kota Nama Daerah Irigasi	Jumlah D.I	Luasan (Ha)	Lokasi
2	Daerah Irigasi Wae Piku	1	1.050	Desa Golomanting di Kecamatan Sananggoang
3	Daerah Irigasi Tiwo Lawo	1	1.200	Desa Nangabire di Kecamatan Lembor
4	Daerah Irigasi Wae Racang	1	1.200	Desa Golodaring di Kecamatan Sananggoang
XIII	KABUPATEN SUMBA TIMUR	3	5.460	
1	Daerah Irigasi Mangili	1	2.666	Desa Tanah Manang di Kecamatan Pahunga Lodu
2	Daerah Irigasi Mataiyang	1	1.579	Desa Laihau di Kecamatan Lewa Tidahu
3	Daerah Irigasi Melolo	1	1.215	Desa Mutung Oeding di Kecamatan Uma Lulu
1	Daerah Irigasi Loli	1	2.390	Desa Doka Kaka di Kecamatan Loli
2	Daerah Irigasi Wenokaka	1	2.653	Desa Rewarara di Kecamatan
XV	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	2	3.589	
	Daerah Irigasi Mataliku	1	1.089	Desa Loura di Kecamatan Keruni
	Daerah Irigasi Wackelo Sewah	1	2.500	Desa Kalemba, Darumere,, Tema Tana di Kecamatan Mareda
	TOTAL	42	60.328	

Intervensi program dan kegiatan yang dilakukan untuk menjawab capaian indikator layanan irigasi ini adalah melalui kegiatan Pemeliharaan Berkala maupun Pemeliharaan rutin Daerah Irigasi yang dilakukan setiap tahunnya. Pemeliharaan Berkala Daerah Irigasi tahun 2022 dilakukan pada beberapa Daerah Irigasi dengan dukungan dana DAU, DAK dan program IPDMIP.

Sementara Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya dengan target Pembangunan 142 embung. Intervensi yang dilakukan diwujudkan melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Sub kegiatan yang dilakukan adalah Pembangunan Embung Kecil secara tersebar di beberapa Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya didukung dengan dana Pinjaman Daerah - PT, SMI. Total kebutuhan pembangunan embung untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air adalah sebanyak 497 buah embung. Target pembangunan sesuai RPJMD dan Renstra untuk tahun 2019-2023 adalah 142 buah embung. Realisasi pelaksanaan di tahun 2019-2020 terbangun sebanyak 66 buah embung (46%) yang pembiayaannya bersumber dari dana APBD. Beban yang belum dicapai sampai akhir tahun anggaran periode 2023 adalah 76 embung (54%). Selain pembangunan embung dengan dana APBD, pembiayaan sumber APBN juga

berkontribusi signifikan dimana sampai dengan periode Oktober tahun 2022 telah terbangun 257 buah embung. Sehingga, secara keseluruhan, jumlah embung terbangun sampai dengan tahun 2022 adalah 417 buah embung atau sebesar 84% terhadap total kebutuhan embung sebesar 497 buah.

2.3.3.3 Sanitasi Lingkungan

Demi mewujudkan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) salah satunya yaitu “Mewujudkan Akses Air Minum dan Sanitasi Aman serta berkelanjutan Bagi Semua”, Pemerintah telah menyelaraskan target SDGs dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang mengamanatkan terwujudnya 90% akses sanitasi layak, termasuk di dalamnya 15% rumah tangga memiliki akses sanitasi aman, serta penurunan angka BABS hingga 0% pada akhir tahun 2024.

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan program pemerintah berupa pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.

Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. STBM dengan 5 (lima) pilar akan mempermudah upaya meningkatkan akses sanitasi masyarakat yang lebih baik serta mengubah dan mempertahankan keberlanjutan budaya hidup bersih dan sehat. Pelaksanaan STBM dalam jangka panjang dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh sanitasi yang kurang baik, dan dapat mendorong terwujudnya masyarakat sehat yang mandiri.

Lima Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) antara lain:

1. Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) ; adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
2. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS); adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMRT); adalah melakukan kegiatan

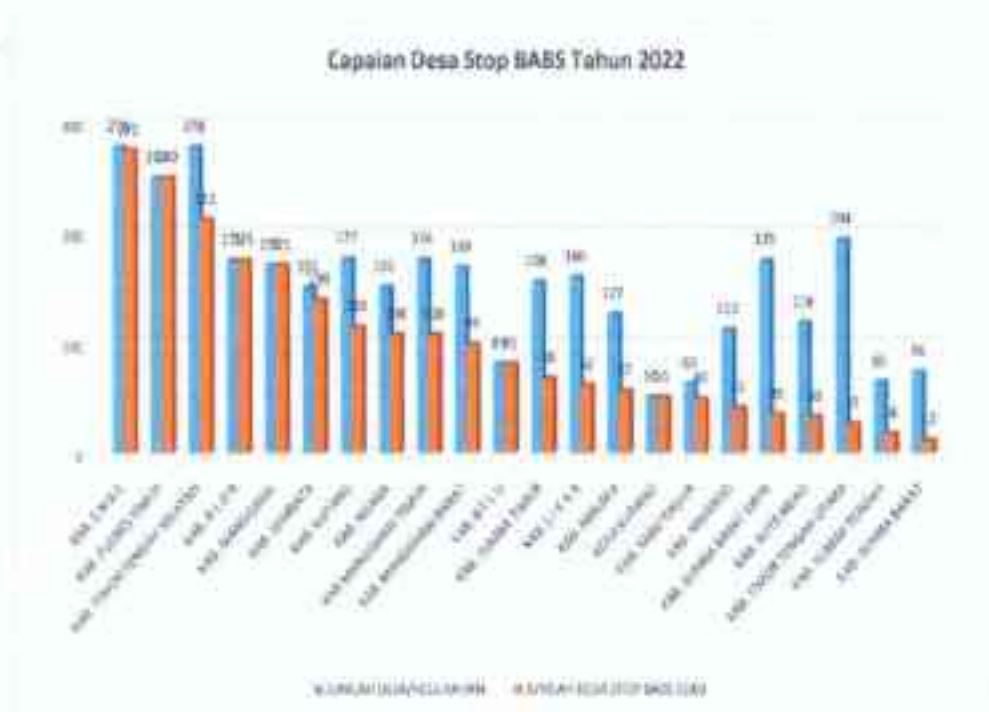
mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.

3. Pengamanan Sampah Rumah Tangga (PSRT); adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.
4. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (PLCRT); adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.

Tabel 2.27
Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan
Jenis Tempat Buang Air Besar
di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021

Wilayah	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar (Persen)											
	Sendiri			Bersama			Kommunal			Tidak ada/ Tidak Menggunakan		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Bumha Barat	43.99	44.84	62.25	10.88	11.77	10.74	3.01	3.61	4.67	40.42	38.74	22.35
Bumbe Timur	62.97	63.98	72.9	9.71	11.63	13.8	0.84	1.12	1.43	23.85	21.28	11.88
Kupang	84.18	84.66	85.86	10.4	9.54	7.6	0.54	0.28	0.74	4.54	3.53	5.8
Timor Tengah Selatan	84.83	82.89	80.12	7.98	10.63	13.13	0	0.28	0.16	7.19	6.1	6.58
Timor Tengah Utara	72.48	81.22	83.38	19.77	11.95	10.04	0.92	0.53	0.75	6.83	6.22	5.62
Belu	77.48	79.39	81.04	12.62	15.65	18.56	2.77	0.83	0.77	5.65	3.93	4.63
Alor	78.91	76.54	72.5	13.76	11.32	21.17	2.44	2.45	3.56	3.6	9.33	2.77
Lembata	90.4	90.13	90.43	8.41	5.74	5.5	0	0.51	0.19	3.19	3.63	3.88
Plores Timur	85.78	83.66	91.91	3.93	6.32	3.53	0.2	0	0	10.87	10.03	5.46
Sikka	70.49	74.75	74.54	13.65	17.69	15.62	1.09	0.44	0.31	13.49	7.12	9.53
Ende	65.85	67.7	72	28.61	23.9	19.17	3.54	4.75	4.38	0	3.43	4.46
Ngada	83.9	92.03	89.14	13.67	5.88	7.25	0.24	0.25	0	2.2	1.83	3.61
Manggarai	67.08	74.3	81.06	16.74	16.57	9.27	2.81	2.3	2.46	13.37	6.44	7.2
Kota Ndan	71.83	79.23	83.71	7.75	5.14	3.99	0.28	1	0.3	19.59	14.49	10.1
Manggarai Barat	68.24	75.64	79.02	16.07	11.59	10.43	5.32	1.84	3.29	15.37	10.94	7.26
Bumbe Tengah	59.33	66.99	68.73	3.58	2.77	5.7	1.58	0.25	2.34	33.38	26.04	23.22
Bumbe Barat Daya	59.47	59.32	66.49	3.28	6.31	5.65	1	0.54	2.02	36.25	33.63	26.84
Kagame	82.11	88.45	87.57	8.99	6.74	5.86	0.5	1.26	1.5	8.8	3.55	5.07
Manggarai Timur	85.71	81.45	83.93	8	10.32	10.01	1.03	0.41	1.53	2.05	7.81	4.54
Sabu Rejua	77.57	85.2	82.22	9.04	7.05	5.58	0.3	0	0.23	12.29	7.57	12.02
Malaka	58.46	62.51	68.02	17.23	17.92	10.59	6.69	4.86	3.69	17.03	14.7	8.69
Kota Kupang	73.75	73.57	76.7	24.21	26.03	22.57	2.05	0.13	0.5	0	0.27	0.12
Nusa Tenggara Timur	74.48	76.39	79.2	12.8	12.94	11.89	1.79	1.13	1.41	10.67	9.3	7.8

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susek)



Gambar 2.9
Capaian Desa/Kelurahan STOP BABS Tahun 2022

Jumlah desa Stop BABS Tahun 2022 berjumlah 2.186 desa dari 3.353 desa/kelurahan (65%). Terdapat 5 kabupaten yang telah mendeklarasikan diri sebagai kabupaten/Kota Stop BABS, yaitu Kota Kupang, Alor, Manggarai, Flores Timur dan Belu. Dari data tersebut juga diketahui masih 9 kabupaten yang pencapaian Desa ODF rendah yaitu di bawah 50% antara lain Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Timor Tengah Utara, Sikka, Rote Ndao, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Nagekeo dan Malaka.

Indikator suatu Desa/Kelurahan dikatakan telah mencapai status SES adalah:

1. Semua masyarakat telah BAB hanya di jamban yang sehat dan membuang tinja/kotoran bayi hanya ke jamban yang sehat.
2. Tidak terlihat tinja manusia di lingkungan sekitar.
3. Ada penerapan sanksi, peraturan atau upaya lain oleh masyarakat untuk mencegah kejadian BAB di sembarang tempat.

Ada mekanisme pemantauan umum yang dibuat masyarakat untuk mencapai 100% KK mempunyai jamban sehat. Ada upaya atau strategi yang jelas untuk dapat mencapai sanitasi total.



Gambar 2.10
Capaian Desa/Kelurahan Melaksanakan STBM Tahun 2022

Jumlah desa yang melaksanakan STBM adalah sebanyak 3.117 desa dari 3.353 desa di Provinsi NTT (92,96%). Terdapat 11 kabupaten/kota yang telah 100 persen melaksanakan STBM, antara lain : Kota Kupang, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Rote Ndao, Manggarai, Belu, Alor, lembata, Flores Timur, Sikka, Sumba Timur dan Kabupaten Kupang. Diketahui pula, masih terdapat 2 kabupaten yang pelaksanaan STBM di desa/kelurahannya masih di bawah 60% yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Nagekeo.

Indikator bahwa suatu Desa/Kelurahan dikatakan telah melaksanakan STBM adalah:

1. Minimal telah ada intervensi melalui Pemicuan di salah satu dusun dalam desa/kelurahan tersebut.
2. Ada masyarakat yang bertanggung jawab untuk melanjutkan aksi
3. intervensi STBM seperti disebutkan pada poin pertama, baik
4. individu (natural leader) ataupun bentuk kelompok masyarakat,
5. Sebagai respon dari aksi intervensi STBM, kelompok masyarakat menyusun suatu rencana aksi kegiatan dalam rangka mencapai komitmen perubahan perilaku pilar STBM, yang telah disepakati bersama,

Tabel 2.28
Data Akses Sanitasi Layak, Desa Stop BABS Dan STBM
Provinsi NTT

No	Lokasi / Kab/ Kota	Jumlah KK Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jumlah Sehat)			Jumlah Desa/ Kelurahan	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)			
		Jumlah KK	Total KK akses Sarana	% KK Akses Sarana Sanitasi		Desa Melaksanakan STBM		Desa Stop BABS (SSS)	
						Jumlah	%	Jumlah	%
1	Sumba Barat	26,109	16,938	61.04%	74	62	83.78%	12	16%
2	Sumba Timur	55,382	47,887	86.47%	156	156	100.00%	68	44%
3	Kupang	74,273	66,521	89.56%	177	177	100.00%	115	63%
4	Timor Tengah Selatan	114,141	112,972	98.98%	278	264	94.96%	212	76%
5	Timor Tengah Utara	57,173	53,925	94.32%	193	185	95.85%	27	14%
6	Belu	53,472	53,472	100.00%	81	81	100.00%	81	100%
7	Alor	47,682	47,682	100.00%	175	175	100.00%	175	100%
8	Lemhara	34,356	34,198	99.54%	151	151	100.00%	139	92%
9	Flores Timur	61,841	61,841	100.00%	250	250	100.00%	250	100%
10	Sikka	78,631	70,908	90.18%	160	160	100.00%	62	39%
11	Erade	66,616	66,600	99.98%	278	258	92.81%	275	99%
12	Ngada	32,240	31,640	98.14%	151	125	82.78%	108	72%
13	Manggarai	79,268	79,268	100.00%	171	171	100.00%	171	100%
14	Rote Ndao	34,942	29,513	84.46%	119	119	100.00%	33	28%
15	Manggarai Barat	56,758	40,908	72.07%	169	169	100.00%	99	59%
16	Sumba Tengah	16,227	13,820	85.17%	65	64	98.46%	16	28%
17	Sumba Barat Daya	57,865	38,325	66.23%	175	92	52.57%	35	20%
18	Nagekeo	31,185	28,573	91.62%	113	64	56.64%	41	36%
19	Manggarai Timur	66,167	62,254	94.09%	176	176	100.00%	108	61%
20	Sabu Raiun	20,198	19,315	95.63%	63	55	87.30%	49	78%
21	Malaka	50,032	37,163	74.28%	127	112	88.19%	57	45%
22	Kota Kupang	79,358	79,358	100.00%	51	51	100.00%	51	100%
	Nusa Tenggara Timur	1,193,916	1,092,081	91.47%	3353	3117	92.96%	2186	65%

Sumber: Dinas PUHR Provinsi NTT, 2021

Akses sanitasi layak penduduk NTT tahun 2022 mencapai angka 91,47 %. Sebagian besar kabupaten di wilayah NTT telah mencapai lebih dari 80 % dan masih 4 kabupaten yang berada di bawah 80% akses sanitasi layak yaitu Kabupaten Malaka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya dan Manggarai Barat

2.3.4. Perhubungan

Transportasi Udara sangat strategis dengan *load Factor* angkutan udara mencapai diatas 70%. Angkutan ini selain dipakai untuk pelayanan kemasyarakatan oleh pemerintah, namun yang lebih banyak menggunakan adalah pihak swasta untuk keperluan ekonomi dan juga keperluan penumpang wisatawan yang datang di NTT karena potensi pariwisata di NTT telah terbukti diminati oleh wisatawan baik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri.

Bandara El Tari sebagai bandara pengumpul skala sekunder dengan status Bandara Internasional dan tiga bandara Pengumpul skala tersier dengan status Domestic yaitu Bandara H. Aroeboesman, Bandara Frans Seda, Bandara Umbu Meheng Kunda dan Bandara Haliwen serta bandara Domestic dengan tingkat pelayanan skala pengumpan yaitu Bandara Komodo, Frans Sales Lega, Mali, Tambolaka, Wunopitu, Gewayantana, Terdamu dan Bandara DC. Saudale.

Tabel 2.29
Arus Penumpang yang Datang dan Berangkat pada Pelabuhan Udara Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019-2021

Bandara	Jumlah Penumpang Pesawat Menurut Pelabuhan Udara (Jiwa)					
	Datang			Berangkat		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Tambolaka - Sumba Barat Daya	103,642	54,633	33,940	106,244	50,006	36,992
Umbu Meheng Kunda - Sumba Timur	72,718	51,044	52,634	77,495	47,519	55,175
Terdamu - Sabu Raijua	5,780	3,952	2,989	5,960	4,191	3,584
A. A. Bere Tulo - Belu	42,869	19,610	7,993	45,040	19,674	7,732
Mali - Alor	48,892	29,639	22,310	49,499	28,884	22,176
Wunopitu - Lembata	14,011	3,959	4,976	13,090	3,809	4,470
Gewayantana - Flores Timur	37,419	24,937	17,753	38,146	25,889	15,650
Frans Seda - Sikka	101,962	59,208	47,324	100,905	54,683	49,376
H. Aroeboesman - Ende	86,939	55,829	54,298	86,404	55,038	55,029
Tareijen - Ngada	41,083	24,381	21,472	45,901	25,921	23,215
Frans Sales Lega - Manggarai	12,925	6,134	10,490	13,244	6,134	11,646
Lekani - Rote Ndao	26,626	13,656	12,218	28,122	14,768	12,357
Komodo - Manggarai Barat	347,510	167,859	154,800	34,6505	163,046	163,045
El Tari - Kota Kupang	936,224	495,384	499,770	817,758	441,124	440,126
Jumlah	1,878,600	1,010,225	942,967	1,774,313	940,695	900,573

Sumber: BPS, tahun 2022

2.3.5. Listrik

Penyediaan tenaga listrik PLN di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan, namun belum mampu memenuhi kebutuhan yang terus bertambah sejalan dengan pertambahan penduduk dan jumlah rumah tangga dan lain-lain. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Listrik maupun Non Listrik sebagaimana Tabel 2.30.

Tabel 2.30
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan (Persen)
Tahun 2019-2021

Wilayah	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan (Persen)											
	Listrik PLN dengan meteran			Listrik PLN tanpa meteran			Listrik non PLN			Bukan listrik		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Sumba Barat	38,75	46,53	62,98	10,27	7,60	-	26,15	23,19	20,57	24,84	22,68	16,45
Sumba Timur	46,30	49,15	71,60	5,21	7,19	-	44,06	36,56	25,26	4,43	7,10	3,14
Kupang	66,89	69,94	84,48	11,02	11,10	-	11,92	8,10	6,84	10,17	10,86	8,68
Timor Tengah Selatan	33,71	40,59	68,76	9,85	7,59	-	19,96	13,54	16,13	36,48	38,26	15,11
Timor Tengah Utara	57,37	70,38	91,46	19,74	14,64	-	8,37	6,64	1,82	14,52	8,35	6,73
Belu	59,39	73,26	92,92	27,04	16,51	-	2,06	0,75	1,12	11,51	9,47	5,95
Alor	61,65	70,22	80,99	5,13	8,03	-	20,74	14,36	12,41	12,48	7,38	6,60
Lembata	75,35	83,56	95,76	9,79	7,85	-	6,28	1,84	0,92	8,58	6,75	3,32
Floures Timur	88,39	89,58	97,62	7,63	6,59	-	0,25	2,78	0,34	3,73	1,05	2,04
Sikka	60,51	68,16	81,79	19,03	13,62	-	11,06	3,80	8,47	9,41	14,42	9,74
Ende	74,86	83,89	93,92	16,07	7,20	-	7,09	3,80	4,52	1,98	5,10	1,56
Ngada	73,58	73,87	82,63	5,51	6,39	-	13,96	12,72	14,87	6,95	7,02	2,50
Manggarai	47,70	59,82	85,28	24,53	14,93	-	19,39	17,13	11,58	8,39	8,13	3,14
Rote Ndao	60,43	71,65	95,33	8,73	9,67	-	17,16	11,95	2,19	13,69	6,74	2,47
Manggarai Barat	39,52	49,44	67,94	12,87	14,84	-	25,96	25,64	20,41	21,65	10,08	11,65
Sumba Tengah	32,16	37,05	53,86	5,02	3,42	-	44,02	41,93	30,60	18,80	17,60	15,54
Sumba Barat Daya	26,87	32,28	51,55	9,54	6,38	-	32,57	25,94	24,31	31,02	35,40	24,14
Nagekro	69,45	82,04	90,58	6,95	10,00	-	11,62	3,90	5,04	11,98	4,05	4,38
Manggarai Timur	29,68	31,38	56,31	12,48	8,55	-	33,31	23,93	32,89	24,53	36,14	10,80
Sabu Raijua	39,59	41,14	57,37	7,58	5,78	-	24,14	47,32	36,54	28,69	5,76	6,08
Malaka	58,08	67,01	90,91	24,71	14,57	-	7,35	8,55	0,84	9,86	9,87	8,25
Kota Kupang	85,67	84,10	99,40	14,26	15,88	-	-	0,00	0,57	0,07	0,02	0,03
Nusa Tenggara Timur	56,83	63,34	81,12	13,24	10,70	-	15,91	12,70	11,31	14,02	13,25	7,57

Sumber: Dinas ESDM Provinsi NTT, 2022

2.3.6. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

2.3.6.1. Koperasi

UU No.17 tahun 2012 tentang perkoperasian mendefenisikan koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Untuk mewujudkan NTT sebagai provinsi koperasi, telah dilakukan berbagai upaya dengan pelibatan lintas pelaku dengan intervensi program dan kegiatan strategis, upaya ini berdampak pada pertumbuhan jumlah koperasi di NTT dari tahun 2019 s/d 2022 yang terus bertambah. Tahun 2020 jumlah koperasi di Provinsi NTT sebanyak 4.256 koperasi, yang terdiri dari koperasi aktif 3.905 dan koperasi tidak aktif sebanyak 351 koperasi. Tahun 2021 jumlah koperasi 4.282 dengan jumlah koperasi aktif 3.330 koperasi, dan 952 koperasi tidak aktif. Tahun 2022 jumlah koperasi 4.291 dengan jumlah koperasi aktif 3.339 dan koperasi tidak aktif 952. Pertumbuhan koperasi di NTT dapat dilihat pada Tabel 2.31 berikut :

Tabel 2.31
Jumlah Koperasi Menurut Kabupaten/Kota Di NTT Tahun 2022

No	Kabupaten/kota	Jumlah
1	Kota Kupang	633
2	Kabupaten Kupang	395
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	166
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	104
5	Kabupaten Belu	179
6	Kabupaten Malaka	89
7	Kabupaten Alor	187
8	Kabupaten Lembata	116
9	Kabupaten Flores Timur	206
10	Kabupaten Sikka	190
11	Kabupaten Ende	187
12	Kabupaten Ngada	122
13	Kabupaten Nagekeo	115
14	Kabupaten Manggarai	173
15	Kabupaten Manggarai Timur	118

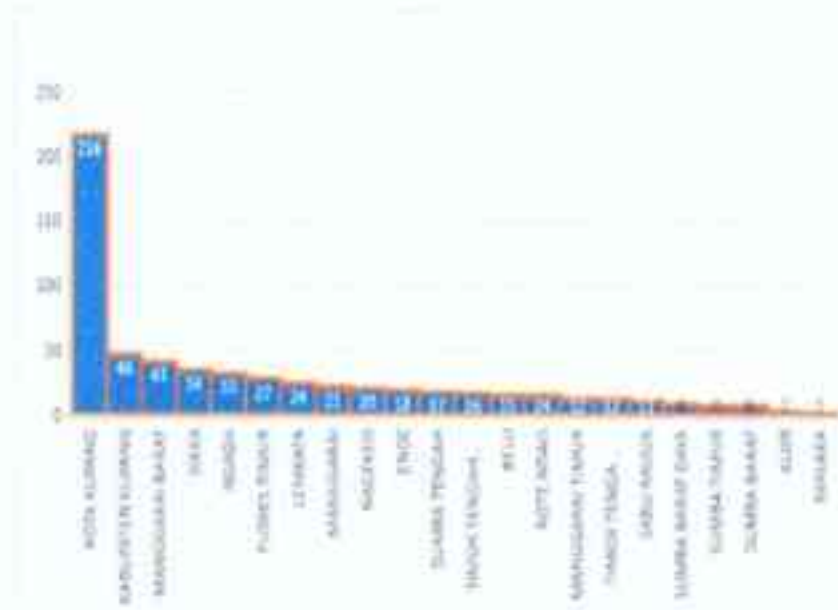
No	Kabupaten/kota	Jumlah
16	Kabupaten Manggarai Barat	147
17	Kabupaten Sumba Timur	149
18	Kabupaten Sumba Tengah	53
19	Kabupaten Sumba Barat	135
20	Kabupaten Sumba Barat Daya	152
21	Kabupaten Rote Ndao	203
22	Kabupaten Sabu Raijua	49
Provinsi		423
JUMLAH		4.291

Sumber : Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTT

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah koperasi terus bertambah selama tiga tahun terakhir dengan tingkat persentase pertumbuhan sebesar 0,822 % atau rata-rata penambahan jumlah koperasi setiap tahun $\pm$ 35 koperasi. Jumlah anggota koperasi tahun 2020 sebanyak 2.200.108 orang, 2021 sebanyak 2.492.946, dan tahun 2022 sebanyak 2.493.230 orang. Pertumbuhan jumlah anggota koperasi selama 2020-2022 memiliki peningkatan sebesar 13,32 %. Kondisi ini berbanding terbalik dengan jumlah manajer Pertumbuhan manajer koperasi selama 2020-2021 yang memiliki trend pertumbuhan negative yang mana tahun 2020 jumlah manajer 1.840 orang, tahun 2021 1.440 orang dan tahun 2022 sebanyak 1.440 orang manajer, hal ini dikarenakan jumlah koperasi tidak aktif yang meningkat pada periode tahun 2020-2021. Kepemilikan modal untuk menunjang pengembangan/ keberlanjutan koperasi sangat didukung oleh ketersediaan modal sendiri serta modal luar. Selama periode 2020-2022 jumlah modal sendiri yang dimiliki koperasi berjumlah 5.445.432.639.417 (triliun) dengan persentase pertumbuhan modal sendiri selama kurun waktu tersebut adalah sebesar 11,14%. Sedangkan jumlah modal luar sebesar 7.054.464.272.918 (triliun) dengan persentase pertumbuhan 11,11%. Untuk aset koperasi selama periode tahun 2020-2022 adalah sebesar 12.548.423.670.4436 (triliun) dengan pertumbuhan 11,55%. Pertumbuhan volume usaha untuk tiga tahun terakhir memiliki pertumbuhan dengan trend menurun dengan jumlah persentase pertumbuhan sebesar -14,11%. Kondisi ini mempengaruhi pertumbuhan SHU pada koperasi di NTT, selama periode ini SHU memiliki persentase pertumbuhan menurun yakni sebesar -2,42%.

2.3.6.2. Digitalisasi Koperasi

Pengertian digitalisasi koperasi adalah upaya untuk mengubah manajemen koperasi menjadi digital. Pengembangan digitalisasi koperasi diharapkan mampu membuat koperasi bergerak dinamis dan mampu mempercepat gerak bisnis koperasi. Digitalisasi Koperasi berorientasi terhadap tujuan, kemudahan, kecepatan layanan, kenyamanan, juga keamanan bertransaksi dengan koperasi. Guna mengembangkan koperasi di NTT lebih dinamis, digitalisasi koperasi menjadi perhatian untuk dilaksanakan dengan melibatkan pihak terkait. Perkembangan digitalisasi di NTT dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.



Sumber : Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTT

Gambar.2.14
Perkembangan Digitalisasi Koperasi Menurut Kabupaten/Kota Di NTT

Dari 4.291 koperasi yang ada di NTT, jumlah koperasi yang sudah melakukan digitalisasi sebanyak 600 koperasi yang tersebar di 22 kabupaten/kota, yang sudah on proses sebanyak 237 koperasi, cleansing 16 koperasi, boarding 15 koperasi, dan yang go live sebanyak 332. Persentase per kabupaten/kota yang sudah melaksanakan digitalisasi koperasi adalah sebagai berikut : Kota Kupang 34% koperasi yang sudah digital dari 633 koperasi; Kabupaten Kupang 11% dari 395 koperasi; Kabupaten Flores Timur 13% dari 206 koperasi; Kabupaten Ende 9% dari 187 koperasi; Kabupaten Belu 8,37% dari 179 koperasi; Kabupaten Alor 1,06% dari 187 koperasi; Kabupaten Lembata 20,6% dari 116 koperasi; Kabupaten Malaka 1,12% dari 89 koperasi; Kabupaten Manggarai 12,1% dari 173 koperasi; Kabupaten



Manggarai Barat 27,8% dari 147 koperasi; Kabupaten Manggarai Timur 10,1% dari 118 koperasi; Kabupaten Nagekeo 17,3% dari 115 koperasi; Kabupaten Ngada 26,2% dari 112 koperasi; Kabupaten Rote Ndao 6,89% dari 203 koperasi; Kabupaten Sabu Raijua 22,4% dari 49 koperasi; Kabupaten Sikka 17,8% dari 190 koperasi; Kabupaten Sumba Barat 4,4% dari 135 koperasi; Kabupaten Sumba Barat Daya 5,2% dari 152 koperasi; Kabupaten Sumba Tengah 32,07% dari 53 koperasi; Kabupaten Sumba Timur 4,69% dari 149 koperasi; Kabupaten Timor Tengah Selatan 7,22% dari 166 koperasi; Kabupaten Timor Tengah Utara 15,3% dari 104 koperasi.

2.3.6.3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM adalah usaha atau bisnis yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, atau badan usaha. UMKM di Indonesia diklasifikasikan menjadi Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. UMKM juga merupakan usaha yg dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha.

Permasalahan umum dibidang koperasi dan UKM adalah rendahnya daya saing produk Koperasi dan UKM menjadi salah satu tantangan pengembangan produk Koperasi dan UKM NTT, berkembangnya bisnis ritail oleh pengusaha besar saat ini menjadikan produk Koperasi dan UKM semakin terhimpit, disatu sisi keberadaan UKM membutuhkan kepastian tempat usaha, dengan keterbatasan yang dimiliki Koperasi dan UKM seringkali melakukan aktivitas usaha dengan lokasi yang tidak pasti dan berpindah-pindah. Selain itu rendahnya produktivitas dan daya saing produk Koperasi dan UKM, terlebih Koperasi dan UKM tidak memiliki jaringan pasar dan pemasaran yang luas, kebanyakan Koperasi dan UKM hanya memiliki akses pasar di tingkat lokal. Kinerja pembangunan UMKM di NTT digambarkan pada grafik di bawah ini



Sumber : Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTT

Gambar 2.12
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menurut jenis usaha

Dari sembilan lapangan usaha UMKM yang ada di Provinsi NTT, dari jumlah tersebut tiga lapangan usaha terbanyak adalah : 1). Lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran yakni sebanyak 39.865 lapangan usaha dengan persentase 40,57%; 2). Lapangan usaha pertanian dengan jumlah 39.552 lapangan usaha dengan persentase 40,25%; 3) Lembaga keuangan sebanyak 98,00 lapanganusaha dengan persentase 9,32%.

2.3.7. Penanaman Modal

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia. Urusan penanaman modal di Provinsi NTT di laksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT. Berikut akan di sajikan Tabel 2.32 realisasi PMDN di Provinsi NTT tahun 2017-2020-2021 :

Tabel 2.32
Realisasi Proyek dan Investasi PMDN Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2017-2020-2021

Wilayah	Realisasi Proyek dan Investasi PMDN Menurut Kabupaten/Kota (Rp/tdk)											
	Tunaga Kerja			Investasi (US \$)			Investasi (Rp)			Proyek		
	2017	2020	2021	2017	2020	2021	2017	2020	2021	2017	2020	2021
Bombia Barat	749	-	-	-	1.579.104	5.143.455	297.428	22.300.000.000	73.094.435.920	1	0	37
Bombia Timur	6.008	-	-	-	78.885.039	34.339.312	813.794.498	1.057.059.519.701	501.353.958.558	2	42	130
Kupang	69	-	-	-	43.146.346	106.245.897	262.606.357	578.225.287.885	1.531.190.098.275	20	13	41
Timor Tengah Selatan	10	-	-	-	1.323.999	6.390.418	1.300.727	17.728.184.000	43.380.107.047	1	13	374
Timor Tengah Utara	-	-	-	-	2.574.104	679.338	-	35.830.000.000	0.919.620.000	-	10	31
Belu	12	-	-	-	16.891.937	537.606	31.061.807	226.301.450.000	7.849.080.000	3	14	17
Alor	281	-	-	-	-	753.809	-	-	11.005.613.714	1	24	10
Lembata	724	-	-	-	5.169.500	280.031	-	69.271.305.930	3.796.744.668	1	4	3
Pikoran Timur	47	-	-	-	1.943.433	7.793	1.700.000	28.043.000.000	113.618.552	1	7	1
Sikka	300	-	-	-	1.436.168	8.360	81.074.238	19.112.556.520	122.083.771	2	10	66
Ende	4	-	-	-	20.550	42.904	31.150.689	275.365.438	627.565.863	2	4	10
Ngada	-	-	-	-	-	6.605.728	-	-	95.487.397.838	-	3	33
Mangrove	790	-	-	-	7.458.632	10.861.804	-	102.625.030.638	158.882.330.902	1	17	82
Satu Nusa	75	-	-	-	1.915.404	3.877.734	3.101.898	20.060.684.788	50.614.909.980	2	4	40
Mangrove Barat	937	-	-	-	68.333.675	10.115.456	790.675.617	915.671.242.832	147.685.656.434	33	100	300
Bombia Tengah	-	-	-	-	-	1.978.627	-	-	23.047.948.350	-	1	7
Bombia Barat Daya	822	-	-	-	12.445.891	9.123.931	131.024.011	166.835.538.323	133.209.056.967	-	28	104
Kapakan	-	-	-	-	-	1.207.333	-	-	17.627.065.303	-	1	30
Mangrove Timur	-	-	-	-	7.206.493	3.872.757	-	96.567.000.000	35.958.244.663	-	6	109

Wilayah	Realisasi Proyek dan Investasi PMDN Menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)											
	Tenaga Kerja			Investasi (USD \$)			Investasi (Rp)			Proyek		
	2017	2020	2021	2017	2020	2021	2017	2020	2021	2017	2020	2021
Selu Rajus	-	-	-	-	-	949.058	-	-	13.858.250.000	-	-	44
Malaka	200	-	-	-	8.761.851	709.120	5.900.000	117.408.807.741	11.083.153.333	1	2	4
Kota Espang Nusa Tenggara Timor	2.179	-	-	-	32.315.238	84.813.107	575.796.964	433.024.196.746	1.238.271.804.481	36	115	328
	12.567	-	-	-	391.833.707	288.136.714	2.538.516.043	3.910.571.670.659	4.206.796.021.848	97	354	1.716

Sumber : BPS Provinsi NTT (2022)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa realisasi investasi PMDN tahun 2021 di Provinsi NTT mencapai Rp. 4.206.796.021.848 dimana angka ini mengalami peningkatan di bandingkan dengan tahun 2020 yang hanya mencapai Rp.3.910.571.670.659. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah proyek di NTT dimana pada tahun 2020 jumlah proyek di NTT mencapai 354 proyek dan pada tahun 2021 meningkat cukup signifikan menjadi 1716 proyek.

Untuk tahun 2022 target realisasi investasi secara Nasional untuk Provinsi NTT sebesar Rp. 6,95 Triliun. Sedangkan target realisasi investasi berdasarkan Perjanjian Kinerja untuk Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 6,324.085.076.095, yang terdiri dari PMA sebesar Rp. 2.529.634.030.438 dan PMDN sebesar Rp. 3.794.451.045.657. Realisasi Investasi s/d 31 Oktober 2022 di Provinsi NTT adalah sebesar Rp. 3.304.140.000.000 (52,25%), terdiri dari realisasi investasi PMA sebesar Rp. 694.540.000.000 (21,02%) dan realisasi investasi PMDN sebesar Rp. 2.609.600.000.000 (78,98%) (DPMTSP Provinsi NTT, 2022).

Beberapa faktor yang mendorong peningkatan investasi di NTT adalah potensi sumber daya alam yang cukup menjanjikan serta di dukung dengan adanya kemudahan dalam berusaha dan berinvestasi di NTT melalui penerapan Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang merupakan sistem perijinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perijinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha dalam negeri dimana dengan penerapan sistem OSS ini investor tidak lagi dihadapkan pada proses administrasi yang berbelit-belit dan rumit.

Selain itu terdapat juga beberapa faktor yang menjadi penghambat masuknya investasi ke NTT antara lain adalah (1) keterbatasan infrastruktur, (2) Keterbatasan kompetensi tenaga kerja, (3) Permasalahan kebijakan insentif fiskal dan non fiskal, dan (4) Legalitas kepemilikan/ status tanah. Selanjutnya juga ditemukan beberapa masalah yang terkait dengan para investor itu

sendiri antara lain adalah (1) Pelaku usaha belum memahami pengisian LKPM Online melalui sistem OSS, (2) Masih terdapat perusahaan belum menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online secara teratur dan tepat waktu, 3) Masih ada perusahaan yang sudah memiliki NIB namun belum memenuhi komitmen atau persyaratan dasar, seperti izin lokasi, izin lingkungan (AMDAL/UKL/UPL), serta kesesuaian dengan tata ruang, dan (4) Lokasi perusahaan yang tersebar di kecamatan dan desa menyulitkan untuk dilakukan pemantauan dan pengawasan sampai ke lokasi sasaran, karena terbatasnya anggaran baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota (DPMPTSP Provinsi NTT, 2022).

2.3.8. Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan strategi dan aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, dunia usaha dan *civil society* untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia khususnya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui program pelayanan sosial yang meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial.

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Pembangunan kesejahteraan sosial pada dasarnya bertujuan untuk memberdayakan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti anak terlantar, anak jalanan, anak cacat, anak nakal, wanita rawan sosial ekonomi, korban bencana alam, fakir miskin, penyandang cacat, tunas susila, gelandangan, pemulung, lansia terlantar, penyandang HIV/AIDS, pekerja migran, Eks Narapidana, Korban Penyalahgunaan Napza, dan komunitas adat terpencil. Selain permasalahan tersebut, migrasi pekerja anak ke Kota Kupang dari beberapa kabupaten seperti TTS, Belu, Sikka, dan Sumba

Timur menimbulkan persoalan tersendiri yang perlu ditangani secara serius. Permasalahan PMKS terbanyak di Provinsi NTT pada tahun 2017 adalah fakir miskin, anak terlantar dan korban bencana alam. Data jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun 2017 tersaji dalam Tabel 2.33 di bawah ini.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah PMKS di Provinsi NTT pada tahun 2017 yang terbanyak adalah keluarga fakir miskin yang mencapai 216.914 keluarga kemudian anak terlantar yang mencapai 120.876 jiwa dan korban bencana alam yang mencapai 86.106 jiwa. Kabupaten/Kota dengan jumlah keluarga fakir miskin terbanyak pada tahun 2017 adalah Kabupaten Sumba Barat Daya dengan jumlah 29.803 keluarga kemudian Kabupaten Manggarai Timur sebesar 25.028 keluarga dan kabupaten Timor Tengah Selatan yang mencapai 24.460 keluarga. Untuk Kabupaten/Kota dengan jumlah anak terlantar terbanyak pada tahun 2017 adalah Kabupaten Manggarai Barat yang mencapai 12.526 jiwa dan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berjumlah 11.601 jiwa. Sedangkan untuk jumlah korban bencana alam terbanyak adalah pada kabupaten Nagekeo yang mencapai 36.787 jiwa dan kabupaten Manggarai Barat yang mencapai 21.358 jiwa. Secara akumulasi total jumlah keseluruhan PMKS di Provinsi NTT sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 426.740 jiwa dan 224.127 keluarga. Beberapa tantangan dalam pelayanan terhadap PMKS di NTT adalah (1) Rendahnya tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas pelayanan sosial yang berdampak pada keterlambatan pemberian pelayanan bagi PMKS, (2) Upaya penanganan dan pemberdayaan fakir miskin yang bersumber dari berbagi pendanaan belum terintegrasi dan bersinergi dengan baik, serta aspek keberlanjutannya belum didesain dengan baik, (3) Kebijakan Nasional mengharuskan upaya penanganan dan pemberdayaan PMKS, terutama fakir miskin menggunakan aplikasi data base sehingga semua pemangku kepentingan pada tingkat desa/keurahan di tuntut untuk memahami teknologi informasi, dan (4) Frekuensi bencana yang cukup tinggi belum diimbangi dengan ketersediaan jumlah SDM Taruna Siaga Bencana dan fasilitas pendukung yang memadai.

2.3.9. Pertanian

Sektor pertanian sampai saat ini tetap memberikan sumbangan besar dalam pembangunan nasional maupun regional, baik berupa sumbangan langsung maupun tidak langsung. Sumbangan langsung seperti dalam pembentukan PDRE, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, perolehan devisa melalui ekspor, dan penekanan inflasi. Sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran sektor pertanian dalam melaksanakan koordinasi dan memberikan fasilitas bagi pelaksanaan pembangunan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat.

Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai daerah kepulauan dengan topografi yang berbukit dan beriklim kering dalam hal struktur perekonomian hingga saat ini masih bergantung pada sektor pertanian. Pada tahun 2021 kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB sebesar 29,17 persen. Nilai tersebut didominasi subsektor peternakan dan hasil-hasilnya (10,18%) dan tanaman pangan (7,58%).

Tabel 2.34
Sektor Pertanian Dalam Pembentukan PDRB Tahun 2019-2021 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Uraian	Tahun		
	2019	2020	2021
I. Sektor Pertanian	27,93	28,51	29,17
1. Tanaman pangan	8,04	7,75	7,58
2. Tanaman hortikultura	2,24	2,20	2,24
3. Tanaman perkebunan	2,26	2,34	2,46
4. Peternakan dan hasil-hasilnya	9,48	9,89	10,18
5. Jasa pertanian dan perburuan	0,43	0,44	0,40
6. Kehutanan	0,13	0,15	0,16
7. Perikanan	5,33	5,75	6,15
II. Sektor-Sektor Non Pertanian	72,07	71,49	70,83

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Nusa Tenggara Timur, BPS

Pada masa pandemi (2020-2021), sektor pertanian tetap mengalami pertumbuhan positif dengan angka 4,26 persen, dibandingkan dengan sektor non pertanian seperti perdagangan, konstruksi, pariwisata yang pertumbuhannya cenderung negatif. Artinya bahwa sektor pertanian di NTT harus dijadikan pegangan dalam mendukung sektor lainnya terutama sektor pariwisata di NTT yang mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi NTT sebagai *prime mover* pembangunan NTT.

2.3.9.1. Tanaman Pangan

Meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya serta tanaman serelia lainnya (sorgum/cantel, jawawut, jelai, gandum, dll). Keseluruhan komoditas di atas masuk ke dalam golongan tanaman semusim, dengan wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih termasuk dalam lingkup kategori pertanian. Contoh wujud produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan antara lain: padi dalam wujud Gabah Kering Giling (GKG), jagung dalam wujud pipilan kering, dan ubi kayu dalam wujud umbi basah.¹

¹ <http://ntt.bps.go.id/publication/2022/04/05/66948483c52dd044e62c7266/produk-domestik->

Perkembangan produksi padi di NTT selama tiga tahun terakhir cenderung fluktuatif. Produksi padi di NTT tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 86.700 ton jika dibandingkan dengan tahun 2019 (Tabel 2.35). Hal ini terjadi sebagai akibat pembatasan social masyarakat dalam mencegah penyebaran covid 19 dan bencana alam yang melanda sentra-sentra produksi padi di NTT. Sementara produksi padi di NTT sepanjang Tahun 2021 mencapai sekitar 731.878 ton GKG atau mengalami peningkatan sekitar 6.854 ton GKG dibandingkan 2020 sebesar 725.024 ton GKG.

Tabel 2.35
Produksi Padi di Provinsi NTT Tahun 2019-2021

Wilayah	Produksi Padi menurut Kabupaten/Kota (Ton)		
	2019 ²	2020 ³	2021 ⁴
Sumba Barat	32.013	23.588	30.574
Sumba Timur	68.917	49.563	54.189
Kupang	61.593	52.086	55.838
Timor Tengah Selatan	20.032	16.496	14.539
Timor Tengah Utara	40.135	12.942	32.661
Belu	17.107	11.761	22.449
Alor	2.382	3.324	3.196
Lembata	2.730	3.591	765
Flores Timur	10.997	11.165	8.089
Sikka	13.051	17.235	11.399
Ende	19.561	20.627	23.684
Ngada	55.563	51.771	54.380
Manggarai	92.029	92.346	96.433
Rote Ndao	37.776	22.600	26.795
Manggarai Barat	121.440	126.012	100.874
Sumba Tengah	25.883	26.238	27.757
Sumba Barat Daya	35.858	42.689	41.311
Nagekeo	40.087	36.790	29.776
Manggarai Timur	88.988	74.361	66.798
Sabu Raijua	4.063	4.493	8.634
Malaka	19.728	24.383	20.239
Kota Kupang	1.792	963	1.498
Nusa Tenggara Timur	811.724	725.024	731.878

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

regional-bruto-provinsi-nusa-tenggara-timur-menurut-lapangan-usaha-2017-2021.html

² <https://ntt.bps.go.id/indikator/53/929/2/produksi-padi-menurut-kabupaten-kota.html>

³ <https://ntt.bps.go.id/indikator/53/929/1/produksi-padi-menurut-kabupaten-kota.html>

⁴ <https://ntt.bps.go.id/indikator/53/929/1/produksi-padi-menurut-kabupaten-kota.html>

Pada tahun 2021, luas tanaman jagung di NTT mencapai $\pm$ 305.000 ha dengan produksi sekitar 735.000⁵ ton atau rata-rata produksi 2,4 ton/ha. Produktifitas jagung di NTT tergolong rendah, jika dibandingkan dengan produktifitas jagung nasional yang sudah mencapai 5,09 ton/ha. Permasalahan utama rendahnya produktifitas tanaman jagung adalah keterbatasan modal usaha dan jaminan pemasaran hasil. Upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT dalam peningkatan produksi tanaman jagung adalah penyediaan sarana produksi berupa benih unggul, pupuk, obat-obatan, dengan dukungan alsintan sehingga memudahkan petani saat penanaman dan panen.

Tabel 2.36
Produksi Jagung Menurut Kabupaten/Kota (Ton), 2019-2021

Wilayah	Produksi Jagung menurut Kabupaten/Kota (Ton)		
	2019	2020	2021
Sumba Barat	23.818	17.816	30.574
Sumba Timur	49.724	48.011	36.030
Kupang	64.017	41.524	42.689
Timor Tengah Selatan	168.398	125.340	183.931
Timor Tengah Utara	46.621	36.406	42.945
Belu	45.185	34.786	31.975
Alor	21.164	25.258	23.995
Lembata	21.866	15.682	30.191
Flores Timur	23.618	18.631	20.118
Sikka	30.878	19.329	30.344
Ende	14.323	17.357	14.938
Ngada	50.719	17.149	16.938
Manggarai	8.447	13.132	10.316
Rote Ndao	10.476	9.312	6.895
Manggarai Barat	41.082	28.637	10.078
Sumba Tengah	19.461	19.364	26.506
Sumba Barat Daya	97.374	109.056	104.280
Nagekeo	21.161	5.335	9.494
Manggarai Timur	41.544	28.697	14.982
Sabu Raijua	4.403	4.464	9.487
Malaka	78.777	55.012	67.796
Kota Kupang	1.272	963	565
Nusa Tenggara Timur	884.326	745.753	750.166

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT dan BPS

⁵ <https://ntt.bps.go.id/indicator/53/1470/1/produksi-jagung-menurut-kabupaten-kota.html>

Kondisi ini memicu pemerintah untuk menyiapkan program yang diharapkan mampu menjadi solusi atas berbagai permasalahan petani dalam skema ekosistem pembiayaan pertanian yang dengan *tagline* **Tanam Jagung Panen Sapi** (TJPS) yang dikembangkan dengan konsep *pentha helix* atau multi-pihak, melibatkan unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media dengan menggerakkan pengelolaan sumberdaya lokal, penyediaan pembiayaan, jaminan pemasaran hasil, penerapan inovasi dan teknologi, serta pelatihan dan pendampingan asumsi semakin tinggi produksi akan semakin tinggi pendapatan.

Peningkatan produksi tanaman pangan dilaksanakan melalui ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi dan pengembangan perbenihan/perbibitan serta didukung dengan sarana dan prasarana pertanian.

Selain padi dan jagung, komoditas tanaman pangan lainnya yang dibudidayakan yaitu kacang-kacangan (kacang tanah dengan produksi tahun 2021 sebanyak 12.476 ton biji kering, kacang hijau dengan produksi tahun 2021 sebanyak 8.971 ton biji kering, kacang kedele dengan produksi tahun 2021 sebanyak 2.292 ton) serta umbi-umbian (ubi kayu dengan produksi pada tahun 2021 sebanyak 675.182 ton umbi basah dan ubi jalar dengan produksi tahun 2021 sebanyak 32.107 ton umbi basah).

2.3.9.2. Hortikultura

Sub kategori tanaman hortikultura terdiri dari tanaman hortikultura semusim dan tanaman hortikultura tahunan. Tanaman hortikultura semusim meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur pendek (kurang dari satu tahun) dan panennya dilakukan satu atau beberapa kali masa panen untuk satu kali penanaman. Sedangkan tanaman hortikultura tahunan meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali masa panen untuk satu kali penanaman. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman hortikultura meliputi kelompok (i) komoditas buah-buahan; (ii) komoditas sayur-sayuran; dan (iii) komoditas biofarmaka.

Tabel 2.37
Produksi Buah-Buahan Tahunan (Kuintal) Tahun 2019-2021⁶

Jenis Buah-Buahan Tahunan	Produksi Buah-Buahan Tahunan (Kuintal)		
	2019	2020	2021
Alpukat	116.825	111.186	342.837
Anggur	183	179	74
Apel	90	76	358
Belimbing	7.555	5.594	6.630
Duku/Langsar	160	42	155
Durian	15.742	14.416	37.131
Jambu Air	10.010	10.375	16.850
Jambu Biji	38.755	52.723	151.505
Jeruk Besar	37.095	20.854	18.454
Jeruk Siam/Kepron	260.177	548.670	568.119
Jeruk/ Orange	51.8447	56.9524	-
Mangga	38	396.599	854.833
Manggis	1.653	9	166
Markisa	210.496	4.242	-
Nangka/Cempedak	78.093	175.346	255.007
Nenas	678.789	164.040	111.060
Pepaya ⁷	2.274.612	668.141	1.020.612
Pisang	37.537	2.369.251	2.364.974
Rambutan	10.465	37.392	78.555
Salak	8.073	29.372	24.84
Sawo/Sapodilla	26.655	6.513	9.131
Sirsak	27.852	25.978	42.508
Sukun	21.989	21.012	30.298

Sumber: BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPIH-BST

Produksi buah-buahan di NTT selama tiga tahun terakhir menunjukkan adanya kenaikan meskipun terdapat beberapa jenis buah yang mengalami penurunan. Jenis buah yang banyak dihasilkan di NTT adalah pisang, alpukat, pepaya, jeruk dan nenas.

⁶ <https://ntt.bps.go.id/indicator/55/983/1/produksi-buah-buahan-tahunan.html>

⁷ Data Sementara sebelum Angkor Tetap. <https://ntt.bps.go.id/indicator/55/982/1/produksi-buah-buahan-tahunan-menurut-kabupaten-kota.html>

Tabel 2.38
Produksi Tanaman Biofarmaka (kg), 2019-2021

Tanaman Biofarmaka	Produksi Tanaman Biofarmaka (kg)		
	2019	2020	2021
Dlingo	74	409	-
Jahe	1.159.878	759.754	917.307
Kapulaga	423	158	1.173
Keji beling/Kecibeling	373	348	-
Kencur	488.075	62.645	80.121
Kunyit	3.708.139	498.986	518.766
Laos/Lengkuas	2.933.639	269.996	208.586
Lempuyang	2.914	2.645	8.193
Lidah Buaya	4.994	12.767	2.962
Mahkota Dewa	18.764	62.070	40.436
Mengkudu/Pace	28.395	19.354	17.411
Sambiloto	2.184	5.682	9.759
Temuireng	11.261	39.522	6.940
Temukunci	5.170	30.506	68.638
Temulawak	61.591	134.810	62.171

Sumber: BPS, Statistik Pertanian Hortikultura BPS/THP

Tanaman biofarmaka dikategorikan sebagai tanaman yang bermanfaat untuk obat-obatan, kosmetik dan kesehatan yang dikonsumsi atau digunakan dari bagian-bagian tanaman seperti daun, batang, buah, umbi (rimpang) ataupun akar.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, jahe merupakan komoditi tanaman obat-obatan terbanyak dengan produksi sebesar 1.625.741 kg dan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 0,27 persen per tahun selama 5 (lima) tahun terakhir.

Tanaman sayuran dapat dikategorikan (i) tanaman sayuran semusim: tanaman sayuran yang berumur kurang dari satu tahun; dan (ii) tanaman sayuran tahunan: tanaman sayuran yang berumur lebih dari satu tahun. Terdapat beberapa komoditas sayur-sayuran mengalami kenaikan produksi maupun penurunan produksi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kebutuhan konsumsi yang berpengaruh pada harga jual dan harga beli, peningkatan dan penurunan luas panen, ketersediaan sarana dan prasarana produksi serta pengaruh iklim yang berpengaruh pada kualitas sesuai preferensi konsumen dan kuantitas produksi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.

2.3.10. Kehutanan

Pembangunan kehutanan mampu mendukung pembangunan ekonomi produktif melalui pengembangan secara proporsional kawasan hutan produksi. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok menghasilkan hasil hutan baik itu hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu. Selain itu, pemanfaatan hutan produksi lainnya berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan baik kayu maupun non kayu.

Hutan Produksi memiliki banyak kegunaan dan manfaat. Salah satunya adalah menghasilkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan bahan baku industri.

Hutan yang memiliki fungsi untuk produksi ini memiliki areal yang relatif luas dan pada umumnya dikelola oleh perusahaan swasta yang sudah besar atau pemerintah daerah setempat.

Tabel 2.40
Luas Hutan Produksi Menurut Kabupaten/Kota (Hektar) di Provinsi NTT
Tahun 2017-2020

Wilayah	Luas Hutan Produksi Menurut Kabupaten/Kota (Hektar)											
	Terbatas			Tetap			Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus			Daerah Eksklusif		
	2017	2018	2020	2017	2018	2020	2017	2018	2020	2017	2018	2020
Sumba Barat	1191.83	922.10	922.10	5106.68	4787.60	4787.60	-	-	-	-	-	-
Sumba Timur	19158.60	19084.76	19084.76	10694.98	23418.21	25418.21	486.83	-	-	72549.75	61366.03	61366.03
Rupang	41736.84	43478.31	43478.23	61340.99	60863.45	60863.45	3082.35	-	-	-	531.73	531.73
Timor Tengah Selatan	3506.80	2923.41	2923.41	43658.10	40566.57	40566.57	-	1807.23	-	-	-	-
Timor Tengah Utara	54514.18	52908.34	53909.34	14021.85	12981.91	12981.91	-	-	-	298.12	300.78	300.78
Sabu	618.30	-	-	953.28	961.80	961.80	-	-	-	-	-	-
Aler	26625.08	26699.70	26699.70	20084.08	19341.02	19341.02	-	-	-	-	-	-
Lembata	-	-	-	299.77	605.12	605.12	-	-	-	-	-	-
Flora Timur	12271.28	11123.00	11123.86	4028.59	4410.55	4410.55	-	-	-	516.42	521.03	521.03
Sikka	843.98	734.53	734.53	902.56	1037.12	1037.12	-	-	-	-	-	-
Bube	405.60	177.73	177.73	30685.74	29653.86	29653.86	-	-	-	1083.83	932.88	932.88
Ngada	-	-	-	5335.88	6330.41	6330.41	-	-	-	30532.55	13438.30	13438.30
Manggari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1155.14	1136.25	1136.25
Kate Ndao	-	-	-	9234.74	9352.55	9352.55	-	1418.35	-	-	-	-
Manggari Barat	-	-	-	18187.00	18174.15	18174.15	-	-	-	-	-	-
Sumba Tengah	16040.22	15189.18	15189.18	5111.39	5707.06	5707.06	-	-	-	-	-	-
Sumba Barat Daya	-	-	-	8420.48	8853.18	8853.18	-	-	-	-	-	-
Ngada	9166.37	9170.56	9178.58	9637.06	9871.63	9871.63	-	-	-	-	-	-
Manggari Timur	-	-	-	16130.45	15583.83	15583.60	-	-	-	3138.85	971.67	971.67
Sabu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sajua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AK

Wilayah	Luas Rutan Produksi Menurut Kabupaten/Kota (Hektar)											
	Terdapat			Tangkap			Kawasan Rutan dengan Tujuan Khusus			Dapat dilayani		
	2017	2018	2020	2017	2018	2020	2017	2018	2020	2017	2018	2020
Malaka	3026,40	2593,40	2594,40	2039,08	2247,40	2247,40	-	-	-	-	-	-
Kota Kupang	-	-	-	-	58,98	58,98	-	-	-	5633,27	1804,80	1804,80
Nusa Tenggara Timur	180361,06	186403,81	186403,81	200993,19	226556,38	226556,38	3549,18	3225,58	-	114307,41	8883,67	8883,67

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021

2.3.11. Kelautan dan Perikanan

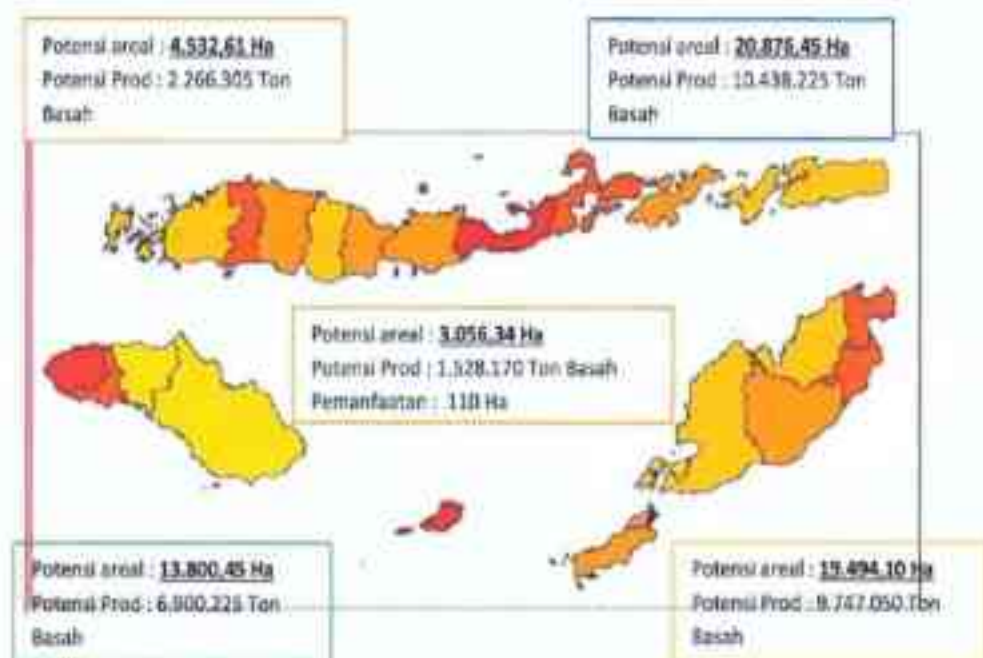
Wilayah NTT memiliki potensi untuk pengembangan sector perikanan, dimana luas daratan NTT $\pm 47.349,9 \text{ Km}^2$ atau 19,14% dari luas NTT dan memiliki lautan dengan luas $\pm 200.000 \text{ Km}^2$ atau 80,85%. Panjang garis pantai 5.700 Km, memiliki desa pantai berjumlah 808, jumlah penduduk di pesisir pantai sebanyak $\pm 1,3$ juta jiwa, dan angka konsumsi ikan masyarakat NTT sebesar 46,39 kg/kapita/thn (2021). Kondisi ini didukung lagi oleh pelaku usaha perikanan yang terdiri dari : petambak garam 1,591%; pembudidaya ikan 25,989%; pemasar perikanan 2,877%; dan nelayan 35,137%. Produksi perikanan tangkap di NTT dapat dilihat pada grafik berikut.

2.3.11.1. Perikanan Tangkap

Potensi perikanan tangkap di NTT sebesar 393.360 (ton/tahun), dengan pemanfaatan sebesar 171.520 (ton/tahun) dengan dominikan dari potensi yang ada baru dimanfaatkan sebesar 43,85% dengan jenis tangkapan terbanyak adalah tongkol, laying, cakalang, kakap, kerapu, dan tuna. Trend produksi perikanan tangkap 2016-2020 memiliki trend kenaikan produksi, dengan rincian tahun 2016 produksi 123.770 ton dan mengalami peningkatan 11,71% pada tahun 2017. Persentase peningkatan terjadi berturut-turut sebesar 14,05% pada tahun 2018, pada tahun 2019 naik sebesar 1,46% dan pada tahun 2020 naik menjadi 7,83%. Dengan demikian pelayanan dinas kelautan dan perikanan dibidang perikanan tangkap dengan demikian kinerja perikanan takap selama kurun waktu 2016-2020 meningkat dengan nilai produksi rata-rata 8,76%

2.3.11.2. Budidaya Laut

Luas lahan budidaya laut di NTT 53.727 Ha, dengan pemanfaatan (budidaya rumput laut dan Kerapu) seluas 12.150 Ha atau 22,6%, dengan produksi rumput laut sebanyak $\pm 1,5$ juta ton basah (**), jenis yang dibudidayakan adalah E. Cottoni dan Sakul. Wilayah pengembangan usaha budidaya laut (rumput laut) di NTT dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Kelautan dan Perikanan Prov. NTT

Grafik.2.13.
Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya
Di NTT Tahun 2021

Produksi rumput laut di NTT sebagian besar berasal dari lima kabupaten yakni: 1). Wilayah Flores Barat dengan potensi area 4.532,61 Ha, potensi produksi sebesar 2.266.305 ton basah, produksi tahun 2021 sebesar 455,67 ton (0,02%); 2). Kabupaten Flores Timur dan Alor dengan potensi area 20.876,45 Ha, potensi produksi 10.438.225 ton basah, produksi 2021 sebesar 73.830,08 ton (0,71%); 3). Kabupaten se daratan Sumba dengan potensi 13.800,45 Ha, potensi produksi 6.900.225 ton basah, pemanfaatannya 600 Ha, produksi 2021 sebesar 35.961,08 ton (0,52%); 4). Kabupaten Sabu Raijua dengan potensi area 3.056,34 Ha, potensi produksi sebesar 1.528.170 ton basah, pemanfaatannya 110 Ha, produksi tahun 2021 70.958,13 ton (4,64%); 5). Kabupaten se daratan Timor, Kabupaten Rote dengan potensi area 19.494,10 Ha, potensi produksi 9.747.050 ton basah, pemanfaatannya 1.539 Ha, produksi 2021 sebesar 1.219.002,96 ton (12,51%).

Produksi rumput laut di wilayah Timor berasal dari kecamatan Semau, Semau Selatan, Kupang Barat, dan Kecamatan Sulamo. Untuk wilayah Rote dari kecamatan Loaholo, Rote Barat, dan Kec. Rote Barat Daya. Produksi rumput laut wilayah Sabu berasal dari Kecamatan Sabu Timur, Haumehara, dan Kecamatan Raijua. Produksi rumput laut wilayah Sumba berasal dari Kecamatan Pahunga Lodu, Wula Waejelu, Rindi, dan Kecamatan Umalulu.

2.3.11.3. Budidaya Air Payau

Luas lahan budidaya air payau di NTT seluas 35.455 Ha, dengan pemanfaatan (budidaya Bandeng, Udang) seluas 1.510 Ha atau 4,3%, dengan produksi Udang dan Bandeng sebanyak $\pm$ 1.115 ton.

2.3.12. Peternakan

Kawasan pengembangan peternakan pada RTRWP berupa hamparan padang penggembalaan untuk Peternakan Sapi, Kuda, Kerbau dan Kambing seluas 832.228 Ha tersebar di Kabupaten/Kota. Kawasan pengembangan peternakan lainnya dilaksanakan terintegrasi dengan kegiatan usaha tanaman pangan dan perkebunan. Perkembangan populasi ternak besar dan ternak kecil yang populasinya menonjol pada tahun 2019-2021 sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel 2.41.

Tabel 2.41
Populasi Ternak Besar Menurut Kabupaten/Kota
dan Jenis Ternak di Provinsi NTT
Tahun 2019-2021 (Ribu ekor)

Wilayah	Populasi Ternak Besar Menurut Kabupaten/Kota											
	Sapi Potong			Sapi Perah			Kerbau			Kuda		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Sumba Barat	1.692	2.400	2.549	-	-	-	13.626	14.811	18.709	6.076	6.903	-
Sumba Timur	54.994	63.693	60.025	5	9	8	40.423	44.007	33.730	33.943	37.338	-
Kupang	299.239	354.759	301.915	-	-	-	1.984	2.297	2.078	8.361	5.292	-
Tikar Tengah Selatan	202.000	206.544	223.076	13	13	12	344	357	357	957	975	942
Timor Tengah Utara	132.675	161.889	145.132	-	-	-	803	872	861	1.454	1.599	-
Belu	74.126	80.344	77.320	11	11	11	788	746	699	792	806	780
Akor	8.258	7.374	8.044	-	-	-	-	-	-	116	127	135
Lembata	5.141	6.978	5.350	-	-	-	-	-	-	2.187	2.406	-
Flores Timur	4.965	5.532	5.896	-	-	-	-	-	-	1.365	1.502	-
Sikka	15.274	18.182	19.309	-	-	-	2.135	2.067	2.216	3.610	2.863	-
Ende	38.342	41.875	44.471	-	-	-	2.828	3.074	3.265	3.549	3.644	-
Ngada	43.436	52.968	56.232	-	-	-	15.265	15.304	17.623	7.251	7.976	-
Manggarai	26.825	27.871	29.309	-	-	-	8.448	9.154	9.753	1.299	1.428	-
Rote Nelan	67.736	81.550	86.606	-	-	-	17.735	19.280	20.475	8.019	8.821	-
Manggarai Barat	15.978	16.544	17.995	-	-	-	15.897	17.281	18.352	218	239	254
Sumba Tengah	8.538	8.917	9.470	-	-	-	10.013	10.885	12.293	7.300	8.030	-
Sumba Barat Daya	3.452	4.385	4.657	-	-	-	16.331	17.753	18.854	6.531	7.184	-
Nagekeo	35.917	29.300	31.212	-	-	-	7.187	7.812	8.296	3.931	4.323	-
Manggarai Timur	15.277	17.580	18.670	-	-	-	9.360	10.175	10.806	3.585	3.943	-

Wilayah	Populasi Ternak Besar Menurut Kabupaten/Kota											
	Sapi Potong			Sapi Perah			Kerbau			Kuda		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Sabu Raijua	5.827	7.356	7.812	-	-	-	11.231	12.208	12.965	8.652	9.517	-
Malaka	82.996	82.512	86.088	-	-	-	471	512	445	75	82	85
Kota Kupang	6.912	7.619	-	-	-	-	32	34	34	84	91	95
Nusa Tenggara Timur	1.087.615	1.188.582	1.248.930	29	33	31	174.903	189.972	190.833	109.355	116.129	-

Catatan: Angka Sementara

Sumber: BPS, tahun 2022

Tabel 2.42
Populasi Ternak Kecil Menurut Kabupaten/Kota
dan Jenis Ternak di Provinsi NTT
Tahun 2019-2021 (Ribu ekor)

Wilayah	Populasi Ternak Kecil Menurut Kabupaten/Kota								
	Babi			Kambing			Domba		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Sumba Barat	65.554	76.264	84.501	2.510	2.526	2.683	-	66	73
Sumba Timur	149.640	179.568	70.145	69.335	70.083	68.725	1.280	1.536	9.380
Kupang	501.690	525.445	474.396	45.862	172.229	155.926	214	220	212
Timor Tengah Selatan	224.521	240.887	230.560	30.674	32.453	29.542	-	-	-
Timor Tengah Utara	86.131	103.357	95.660	46.666	46.974	52.529	38	46	49
Bela	69.219	70.399	66.110	19.205	19.386	17.297	-	37	34
Alor	119.459	143.351	158.833	50.984	51.321	54.503	-	-	-
Lembata	54.988	65.985	73.111	49.248	49.573	52.647	624	749	830
Flores Timur	104.465	125.358	138.897	76.000	76.501	81.244	928	1.115	1.235
Sikka	160.149	88.198	97.723	67.571	115.511	122.673	281	337	373
Ende	71.247	85.496	94.730	31.161	31.366	33.311	16	19	21
Ngada	171.033	205.239	227.405	31.404	31.611	33.571	2.603	3.123	3.460
Manggarai	47.316	56.779	62.911	13.554	13.643	14.489	-	-	-
Rote Ndao	56.656	67.987	75.330	59.592	59.985	63.704	25.342	30.410	33.694
Manggarai Barat	44.584	53.500	59.278	7.235	7.283	7.735	-	-	-
Sumba Tengah	42.957	51.548	57.115	11.618	11.734	13.560	-	-	15
Sumba Barat Daya	96.725	116.070	128.606	21.507	21.811	23.163	-	-	-
Nagekeo	105.755	126.906	140.612	51.590	51.930	55.150	8.121	9.822	10.883
Manggarai Timur	74.100	88.920	98.523	35.225	35.457	37.655	-	-	-
Sabu Raijua	40.827	48.992	54.283	65.717	66.151	70.252	26.081	28.973	32.102
Malaka	104.646	125.575	69.301	23.642	23.797	33.996	-	-	-
Kota Kupang	40.839	49.006	-	8.350	8.405	7.989	61	79	66
Nusa Tenggara Timur	2.432.501	2.694.830	2.598.370	818.650	999.730	1.032.344	65.589	76.532	92.427

Sumber: Dinas Peternakan Provinsi NTT, 2022

Berdasarkan Tabel 2.41 dan Tabel 2.42, diketahui bahwa perkembangan populasi per komoditinya cenderung menunjukkan angka positif. Kenaikan populasi tertinggi disumbangkan ternak Babi untuk ternak kecil dan Sapi untuk ternak besar. Peningkatan populasi ternak Sapi merupakan wujud suksesnya pelaksanaan tekad menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi Ternak.

Untuk menjaga kesehatan daging, pembangunan peternakan didukung 28 unit Rumah Potong Hewan (RPH) yang terdiri dari 27 RPH pemerintah dan 1 RPH Swasta. RPH yang ada belum mampu memberikan pelayanan masyarakat karena 40% lebih kegiatan pemotongan ternak secara perorangan dilakukan di luar RPH.

Tabel 2.43
Banyaknya Rumah Potong Hewan Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2019-2021

Wilayah	Banyaknya Rumah Potong Hewan Menurut Kabupaten/Kota (Unit)								
	Pemerintah			Swasta			Jumlah		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Sumba Barat	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Sumba Timur	2	2	2	-	-	-	2	2	2
Kupang	3	3	3	1	1	1	4	4	4
Timor Tengah Selatan	2	2	2	-	-	-	2	2	2
Timor Tengah Utara	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Belu	2	2	2	-	-	-	2	2	2
Alor	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Lembata	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Flores Timur	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Sikka	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Ende	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Ngada	2	2	2	-	-	-	2	2	2
Manggarai	2	2	2	-	-	-	2	2	2
Rote Ndao	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Manggarai Barat	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Sumba Tengah	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Sumba Barat Daya	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Nagekeo	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Manggarai Timur	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Sabu Raijua	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Malaka	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Kota Kupang	2	2	2	-	-	-	2	2	2
Nusa Tenggara Timur	25	27	27	1	1	1	26	28	28

Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2022

2.3.13. Pariwisata

Pada Triwulan II-III tahun 2022, sektor Pariwisata di Provinsi NTT mulai menunjukkan pemulihan sehingga mampu tumbuh sebesar 30,47% diakhir Triwulan III. Pertumbuhan tinggi yang dicapai sektor pariwisata dipengaruhi oleh kebijakan maskapai penerbangan membuka kembali rute penerbangan ke Nusa Tenggara Timur walaupun dengan kebijakan *fuel surcharge*, yang mengakibatkan naiknya harga tiket pesawat. Hal ini dimaknai bahwa wisatawan yang datang ke Nusa Tenggara Timur lebih mementingkan pada destinasi wisatanya dibanding harga tiket pesawat. Dengan dibukanya kembali rute penerbangan ke Nusa Tenggara Timur, memberikan dampak bagi meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan semakin berkembangnya Lapangan Usaha Akomodasi Makan Minum yang tercermin dari kinerja penyaluran kredit akumasi yang pada Triwulan II 2022 meningkat dari Triwulan sebelumnya menjadi 27,90%, karena keterisian kamar dan kedatangan jumlah wisatawan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur serta optimisme masyarakat yang terus membaik. Selain itu juga, penurunan kasus covid 19 yang menyebabkan Pemerintah semakin melonggarkan aturan perjalanan domestik, memberikan andil besar dalam peningkatan kunjungan wisatawan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Oleh karena itu, sebagai sektor terbesar yang memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah perlu melakukan strategi-strategi dalam pengembangan pariwisata NTT, seperti : 1).peningkatan koordinasi, sinergitas dan kerjasama antar pihak Pemerintah Pusat, Daerah, sektor-sektor terkait, investor lokal/asing, BUMN, pelaku usaha dan UMKM dan masyarakat untuk mendukung upaya perbaikan pariwisata dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi secara berkelanjutan di NTT. 2). Pemerintah Daerah bersama dengan asosiasi serta perusahaan teknologi meningkatkan promosi digital untuk mempromosikan Labuan Bajo sebagai salah satu kawasan wisata super premium sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemitraan pelaku usaha melalui ekosistem digital, serta mempercepat transformasi digital UMKM sektor pariwisata. 3). Meningkatkan 10 A terhadap pariwisata Labuan Bajo salah satunya melalui pengembangan dan maintenance terhadap destinasi wisata Labuan Bajo dan percepatan pembangunan infrastruktur.

Seperti yang diketahui bahwa Labuan Bajo merupakan salah satu Destinasi Wisata Super Prioritas (DWSP) yang ditetapkan oleh Pemerintah

Pusat. Potensi wisata tersebut perlu dioptimalkan oleh pemerintah daerah melalui program dan kegiatan dalam rangka pengembangan destinasi wisata Labuan Bajo dalam mendukung pengembangan pariwisata sebagai *prime mover economy*.

Tabel 2.44
Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2019-2022

Wilayah	Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik (Juta)											
	Mancanegara				Domestik				Jumlah			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Sumba Barat	-	862	946	1.212	-	3.079	7.083	7.320	-	3.941	8.029	8.532
Sumba Timur	-	202	87	930	-	3.880	18.489	34.034	-	4.082	18.576	35.854
Kupang	-	316	-	424	-	3.759	4.619	42.041	-	4.075	4.619	42.465
Timor Tengah Selatan	-	-	-	-	-	6.927	11.038	12.854	-	6.927	11.038	12.854
Timor Tengah Utara	-	37	-	-	-	1.250	10.980	36.693	-	1.287	10.980	36.693
Belu	-	811	34	9.053	-	20.429	22.324	3.600	-	21.240	22.358	14.853
Alor	-	12	18	198	-	1.431	2.382	933	-	1.443	2.400	1.131
Lembata	-	-	-	-	-	1.203	1.760	-	-	1.203	1.760	-
Flora Timur	-	147	21	-	-	2.685	20.156	-	-	2.832	20.177	-
Sikka	-	2.139	119	-	-	12.396	21.214	-	-	14.455	21.333	-
Ender	-	31	6	4.266	-	2.145	13.053	66.162	-	2.176	13.059	70.428
Ngada	-	62	25	2.584	-	3.841	12.384	96.738	-	3.903	12.413	99.422
Manggarai	-	116	4	-	-	2.128	10.438	-	-	2.244	10.439	-
Rote Ndao	-	490	-	305	-	983	1.890	534	-	1.473	1.890	940
Manggarai Barat	-	15.031	6.129	44.443	-	64.917	136.836	89.643	-	70.948	142.965	134.086
Sumba Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumba Barat Daya	-	4.116	172	-	-	2.366	4.217	-	-	6.482	4.389	-
Ngakoro	-	-	-	-	-	2.142	5.252	-	-	2.142	5.252	-
Manggarai Timur	-	-	-	-	-	1.001	2.488	-	-	1.001	2.488	-
Sabu Raijua	-	9	-	5	-	520	501	68.519	-	532	501	68.524
Malaka	-	-	-	29	-	771	622	627	-	771	622	626
Kota Kupang	-	20.377	1.180	1.969	-	202.532	235.898	106.509	-	222.909	237.078	108.178
Nusa Tenggara Timur	155.900	44.778	8.745	65.619	931.967	342.288	533.641	568.727	987.867	387.066	552.386	634.346

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, finansial daerah, inflasi daerah dan SDMnya.

2.4.1. Ekonomi Makro Regional

Perekonomian Provinsi NTT pada triwulan II 2022 tumbuh sebesar 3,01%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,86%, meskipun masih lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang dapat tumbuh sebesar 5,44%. Dari sisi pengeluaran, peningkatan didorong oleh akselerasi konsumsi rumah tangga seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan melalui penurunan level PPKM di tengah penyebaran COVID-19 yang semakin mereda. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), sebagian besar LU mengalami perbaikan ekonomi terutama LU utama yaitu LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, LU Perdagangan Besar dan Eceran, serta LU Konstruksi. Musim panen raya yang terjadi ditriwulan II mendorong pertumbuhan LU Pertanian. Sementara itu, peningkatan aktivitas masyarakat di tengah melandainya pandemi COVID-19 serta momen libur HBKN Idul Fitri turut mendorong LU Perdagangan. Adapun pertumbuhan LU Konstruksi didorong oleh berlanjutnya pembangunan proyek-proyek strategis pemerintah di Provinsi NTT. Kinerja perekonomian NTT pada Triwulan. III-2022 tercatat tumbuh sebesar 3,35% (yoy) searah dengan proyeksi REKDA Oktober 2022 sebesar 3,22% (yoy) dan meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,11% (yoy). Kinerja ekonomi NTT pada triwulan III 2022 terutama bersumber dari Konsumsi Rumah Tangga (KRT) Konsumsi Pemerintah dan Ekspor. Sementara dari sisi lapangan usaha ((LU) kinerja LU Pertanian, LU Administrasi Pemerintah, dan dan LU Perdagangan Besar dan Eceran menjadi penopang pertumbuhan ekonomi NTT. Program pemerintah seperti Food Estate, Ekosistem TJPS Pola Kemitraan, Pembangunan Infrastruktur dari Pinjaman PT. SMI dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

2.4.2. Keuangan Pemerintah Daerah

Realisasi total belanja pemerintah (APBD dan APBN) di Provinsi NTT sampai dengan Triwulan II 2022 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sejalan dengan perlambatan konsumsi pemerintah. Total belanja tercatat sebesar Rp14,365 triliun, atau berkontraksi 7,24% dibandingkan Triwulan II pada tahun 2021. Nominal realisasi tersebut

mencapai 29,25% dari total anggaran, juga menurun dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 30,14%. Penurunan terjadi baik pada belanja APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota. Di sisi lain, realisasi pendapatan pemerintah sampai dengan Triwulan II 2022 tercatat tumbuh sebesar 1,41%, terutama didorong oleh realisasi pendapatan transfer yang membaik khususnya ditingkat Kabupaten/Kota. Realisasi belanja APBD pmda pada triwulan III 2022 tercatat sebesar Rp14,9 Triliun, atau tumbuh 6,79% (yoy). Secara persentase, realisasi belanja pada triwulan III 2022 mencapai 49,8% dari total pagu sebesar Rp30,0 Triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2021 yang mencapai realisasi 45,9% dari total pagu sebesar Rp30,4 Triliun. Sebanyak 21,0% dari realisasi belanja APBD pada triwulan III 2022 di NTT berasal dari belanja pemerintah provinsi, sedangkan sisanya dari belanja pemerintah kabupaten/kota. Jenis belanja yang memiliki share terbesar adalah belanja operasional yakni sebesar 68,1%. Realisasi belanja APBN di Provinsi NTT pada triwulan III 2022 tercatat sebesar Rp12,0 Triliun, atau tumbuh 4,71% (yoy). Secara persentase, realisasi belanja pada triwulan III 2022 mencapai 62,4% dari total pagu sebesar Rp19,2 Triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2021 yang mencapai realisasi 54,5% dari total pagu sebesar Rp20,9 Triliun. Jenis belanja APBN yang memiliki share terbesar adalah belanja pegawai sebesar 20,4% diikuti belanja barang 19,9% dan dana desa 18,0%. Realisasi anggaran pemerintah menjadi salah satu penopang perekonomian Provinsi NTT, sehingga perlu terus didorong agar dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi.

2.4.3. Perkembangan Inflasi

Tren inflasi tahunan (yoy) maupun inflasi kalender (IHK) untuk Triwulan I-III secara nasional dan regional (NTT) terus bergerak naik berbeda dengan tren pada Triwulan IV baik Nasional maupun regional mengalami penurunan. Secara nasional, sepanjang Januari - September 2022, angka inflasi terus meningkat. Laju inflasi tahunan (yoy) Triwulan I 2,64 % meningkat menjadi 4,35 % pada Triwulan II dan pada Triwulan III menjadi 5,95%. Sementara itu inflasi kalender (IHK) pada periode yang sama juga mengalami kenaikan signifikan dari 0,69 % pada Triwulan I menjadi 2,83 % pada Triwulan II dan 4,84 % di Triwulan III. Secara Nasional pendorong utama inflasi September adalah komponen harga yang diatur pemerintah. Inflasi yang berasal dari komponen harga yang diatur pemerintah disebabkan oleh kenaikan tarif angkutan pasca penyesuaian harga BBM. Penyesuaian harga BBM berdampak pada lonjakan inflasi kelompok energi hingga mencapai 16,48% pada

September 2022. Komoditi makanan yang bergejolak akibat kenaikan harga BBM adalah cabai rawit, beras dan telur ayam ras. Pada periode yang sama di NTT, angka inflasi tahunan (yoy) Triwulan I 2,89 % meningkat menjadi 4,28 % pada Triwulan II dan pada Triwulan III menjadi 6,97. Sementara itu inflasi kalender (IHK) pada periode yang sama juga mengalami kenaikan signifikan dari Triwulan I 0,71 % menjadi 2,96 % pada triwulan II dan 4,89 % di Triwulan III. Tren inflasi tahunan (yoy) maupun inflasi kalender (IHK) Nasional dan NTT meningkat secara paralel dari Januari-September 2022. Besaran inflasi kalender (IHK) menunjukkan laju kenaikan yang relatif besar. Hal ini mengindikasikan kenaikan biaya hidup yang relatif besar pada periode Januari - September 2022. Inflasi Provinsi NTT pada tahun 2022 terutama bersumber dari peningkatan harga dari kelompok komoditas transportasi, yakni tarif angkutan udara dan angkutan dalam kota. Hal ini seiring dengan kebijakan *fuel surcharge* yang diterapkan Kementerian Perhubungan untuk angkutan udara dan penyesuaian tarif angkutan penumpang umum dalam wilayah Kota Kupang. Selain itu, beberapa komoditas dari kelompok makanan, minuman & tembakau seperti minyak goreng, rokok kretek filter, dan daging babi turut menjadi penyumbang inflasi di triwulan II 2022. Pada triwulan III 2022, tekanan inflasi masih terjadi dan bahkan lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2022. Hal ini didasarkan pada faktor pendorong inflasi yang berasal dari tarif angkutan udara yang dipengaruhi oleh meningkatnya mobilitas masyarakat yang belum dapat diimbangi dengan pemulihan kapasitas maskapai penerbangan. Selain itu, komoditas hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah yang sempat mengalami kenaikan harga yang signifikan diawal triwulan II juga menjadi penyumbang inflasi dari sisi bahan pangan untuk triwulan III pada tahun 2022. Untuk Triwulan IV 2022 tren inflasi di Provinsi NTT berpola menurun. Secara tahunan, inflasi NTT pada Oktober 2022 tercatat sebesar 7,37% (yoy) dan pada November 2022 tercatat sebesar 6,74%, hal ini juga sama dengan keadaan inflasi tahunan di Nasional pada bulan Oktober 2022 tercatat sebesar 5,71% dan pada bulan November turun menjadi 5,42% .Tekanan inflasi tahunan di NTT terutama didorong oleh kelompok administered prices yang mengalami kenaikan signifikan seiring dengan kenaikan tarif angkutan udara serta penyesuaian harga BBM. Selain itu, puncak panen hortikultura yang telah berlalu juga dapat mengurangi ketersediaan pasokan sehingga berdampak pada kenaikan harga. Kenaikan tarif angkutan udara seiring dengan masih tingginya harga avtur juga dapat mendorong inflasi.

2.4.4. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Pengelolaan Uang Rupiah

Indikator utama sistem pembayaran non tunai, yaitu transaksi BI-RTGS (*Real Time Gross Settlement*) merupakan indikator yang mengalami pertumbuhan nilai transaksi yang paling besar pada triwulan II 2022. Akan tetapi, indikator transaksi lain seperti transaksi kartu debit mengalami perlambatan dan kartu kredit mengalami kontraksi yang lebih dalam. Pada triwulan IV 2022 hingga bulan Oktober transaksi tunai di Provinsi NTT mengalami posisi net inflow senilai Rp24,8 miliar. Sementara itu, transaksi RTGS pada bulan Oktober tumbuh sebesar 71,69% (yoy), sedangkan transaksi kliring atau Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) berkontraksi sebesar 26,87% (yoy). Transaksi e-commerce di Provinsi NTT pada triwulan III 2022 tumbuh 2,26% (yoy) menjadi Rp259,74 Miliar. Transfer bank adalah metode pembayaran yang paling banyak digunakan dalam transaksi e-commerce. Selanjutnya, jumlah merchant dan user QRIS juga terus berkembang. Pada bulan Oktober 2022 jumlah merchant QRIS di NTT mencapai 139 ribu merchant, sedangkan user QRIS per bulan September sebanyak 105 ribu orang (Penambahan 90.060 user pada tahun 2022). Jadi sistem pembayaran nontunai, yaitu transaksi BI-RTGS masih merupakan indikator yang mengalami pertumbuhan nilai transaksi yang paling besar.

2.4.5. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Jumlah angkatan kerja di Provinsi NTT pada Agustus 2022 tercatat sebesar 3,02 juta orang, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 75,23% naik 1,45% dibandingkan Agustus tahun sebelumnya. Selama Agustus 2021-Agustus 2022, lapangan usaha industri pengolahan menjadi sektor tertinggi penyerap tenaga kerja di NTT (sebanyak 36,83 ribu orang), sementara lapangan usaha pertanian menyerap 26 ribu orang, transportasi dan pergudangan menyerap sebanyak 19,09 ribu tenaga kerja. Lapangan usaha konstruksi mengalami penurunan paling besar yaitu sebanyak 12,78 ribu orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2022 tercatat sebesar 3,54% menurun sebesar 0,47% dari Agustus tahun sebelumnya. Kondisi ketenagakerjaan terindikasi membaik, tercermin dari jumlah pekerja terdampak COVID-19 yang menurun 288,64 ribu orang dibandingkan periode Agustus 2021. Sementara itu, rasio kemiskinan di Provinsi NTT pada Maret 2022 tercatat sebesar 20,05%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, pada bulan September 2022, NTP Nusa Tenggara Timur sebesar 95,14% terjadi peningkatan 0,70% jika dibandingkan dengan NTP Nusa Tenggara Timur pada bulan Agustus 2022.

AR

2.4.6. Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Provinsi NTT pada keseluruhan tahun 2022 diperkirakan tumbuh pada kisaran 2,8–3,6%, meningkat dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2021. Dari sisi pengeluaran, akselerasi kinerja perekonomian Provinsi NTT ditopang oleh meningkatnya konsumsi swasta dan investasi seiring dengan berlanjutnya program vaksinasi sebagai *game changer* dalam pemulihan ekonomi. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan diperkirakan ditopang oleh perluasan program pemerintah yang mendorong kinerja LU Pertanian dan LU Perdagangan Besar dan Eceran sejalan dengan normalisasi mobilitas masyarakat. Namun demikian, pertumbuhan yang lebih tinggi sedikit tertahan akibat penyebaran varian virus *omicron* pada awal tahun 2022 yang berdampak terhadap peningkatan kasus COVID-19 dan penebalan kebijakan pembatasan. Tekanan inflasi Provinsi NTT pada tahun 2022 diperkirakan meningkat dibandingkan dengan inflasi tahun sebelumnya didorong oleh kenaikan harga BBM yang berimbas pada kenaikan harga komoditas pangan, angkutan udara dan angkutan darat. Berdasarkan disagregasinya, tekanan inflasi diperkirakan terjadi pada komponen *volatile food* dan *administered prices*. Koordinasi kebijakan bersama Pemerintah daerah melalui TPID terus dilakukan dalam menjaga ekspektasi inflasi dan meminimalkan risiko inflasi.

2.5 PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

2.5.1. Urusan Pendidikan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan, pelaksanaan urusan pendidikan sesuai SPM yang dilaksanakan Provinsi adalah:

- a. Pendidikan Menengah (peserta didik yang berusia 16–18 Tahun)
- b. Pendidikan Khusus (peserta didik yang berusia 14–18 Tahun)

Tabel 2.45
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi Urusan Pendidikan

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Batas Waktu Capaian	Target Capaian (%)	Realisasi
Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah	Tahun 2021	100	75,77
Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Tahun 2021	100	74,65

Sumber data : Permendagri, 100 Tahun 2018

Adapun SPM urusan Pendidikan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencakup 2 (dua) indikator pelayanan yakni:

- Partisipasi anak usia 16-18 Tahun yang berada pada Pendidikan menengah sebanyak 304.310 anak dari jumlah anak usia 16-18 Tahun sebanyak 401.600 anak.
- Partisipasi anak disabilitas usia 4-18 Tahun yang berada pada sekolah luar biasa (SLB) sebanyak 2.679 anak dari jumlah anak disabilitas usia 4-18 Tahun sebanyak 3.589 anak.

2.5.2. Urusan Kesehatan

Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi dan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi.

1. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (BabVII) terdapat target untuk Urusan Kesehatan yakni Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan (100%) setiap Tahun dari 2018-2023. Akan tetapi tidak diuraikan target masing-masing Pelayanan Dasar sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Tabel 2.46
Target dan Realisasi Menurut Jenis Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Batas Waktu Capaian	Target Capaian (%)	Realisasi (%)
Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	Tahun 2021	100	100
Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	Tahun 2021	100	100

Sumber data : Pemerintah 100 Tahun 2018

Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2021, untuk 2 indikator tersebut masing-masing 100%. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), dipilah wewenang antara Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

2.5.3. Urusan Pekerjaan Umum

1. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum jenis pelayanan dasarnya adalah Pemenuhan Kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota dengan indikator:

- Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota.

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum, sedangkan air minum curah adalah air hasil olahan instalasi pengolahan air pada Sistem Penyediaan Air Minum lintas Kabupaten/Kota.

- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota.

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang berhubungan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Daerah	Realisasi	Ket
Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	100%	11,61%	Batas Waktu pencapaian adalah 100% setiap Tahun Anggaran, sesuai dengan Permendagri 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Penyediaan pelayanan Pengolahan limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara Yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik Regional lintas Kabupaten/Kota	100%	-	Tidak terdapat Kegiatan terkait Pelayanan Dasar tersebut pada Dinas PUPR Provinsi NTT

Sumber data : Permendagri 100 Tahun 2018

2.5.4. Urusan Perumahan Rakyat

1. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal untuk untuk Bidang Perumahan Rakyat jenis pelayanan dasarnya adalah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi dan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi dengan indikator:

- Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni;
- Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Ket.
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi korban Bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara korban Bencana yang Meperoleh rumah layak huni	100%	-	Batas waktu pencapaian adalah 100% setiap tahun anggaran, sesuai dengan
Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi masyarakat Yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi Yang memperoleh Fasilitas penyediaan Rumah yang layak huni	100%	-	Permendagri 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sumber data : Permendagri 100 Tahun 2018

2.5.5. Urusan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

2.5.5.1. Satuan Polisi Pamong Praja

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum (TRANTIBUM) dan Bidang Penegakan peraturan Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah PERDA dan PERKADA yakni:

- Penganganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi
- Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi

SPM	Target (%)	Realisasi (%)
Penganganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	100	95,71
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	100	97,12

2.5.5.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Jenis Pelayanan Dasar

- Pelayanan informasi rawan bencana
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi

Kegiatan	Target	Realisasi
Pelayanan informasi rawan bencana	22 Kabupaten/Kota	100%
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	22 Kabupaten/Kota	27,7%
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	22 Kabupaten/Kota	100%

2.5.6. Urusan Sosial

1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan dasar pada SPM Bidang Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur:

- Rehabilitasi sosial dasar Penyandang disabilitas terlantar di panti
- Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di dalam Panti;
- Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Provinsi

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi

Target yang ditetapkan pemerintah Daerah dalam mencapai SPM tahun 2021 dimuat dalam RPJMD serta realisasi target standar pelayanan minimal oleh Dinas Sosial Provinsi NTT Tahun 2021 sebagai berikut:

No	SPM	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang disabilitas Terlantar di dalam panti.	100	100
2.	Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di dalam Panti	100	100
3.	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	100	100
4.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi	100	100

2.6. CAPAIAN SDGS PROVINSI NTT TAHUN 2021

Secara umum, RPJMD Provinsi NTT periode 2018-2023 sudah mengandung unsur-unsur yang jelas berkontribusi pada pencapaian SDGs. Namun, dalam proses pelaksanaannya, program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah masih bersifat terpusat pada aktor pembangunan dari sisi pemerintah semata. Oleh karena itu, perlu penguatan terkait partisipasi dari aktor pembangunan non-pemerintah yang seharusnya dapat difasilitasi sedemikian rupa agar bekerja secara kolaboratif dengan para aktor pembangunan dari sisi pemerintah.

Dari total 75 indikator SDGs yang mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi NTT, tercatat hanya 37 indikator atau sebesar 49,3% yang tercapai, sedangkan sisanya sebanyak 38 indikator atau 50,7% belum tercapai. Ini membutuhkan perhatian serius untuk ditingkatkan lagi kinerjanya.

Berdasarkan Laporan Tahunan SDGs Tahun 2021, anggaran atau dana yang dialokasikan untuk empat pilar SDGs sebesar Rp. 1.871.915.172.256,- yang terbagi dalam empat pilar sebagai berikut: (1) Pilar Sosial sebesar Rp. 1.031.635.645.362,- (55,11%); Pilar Ekonomi sebesar Rp. 76.789.992.396,- (4,10%); Pilar Lingkungan sebesar Rp. 759.491.895.197,- (40,57%); Pilar Hukum dan Tata Kelola sebesar Rp. 3.997.639.301,- (0,21%). Terdapat empat sektor yang mendapatkan anggaran terbesar, yaitu sector pendidikan (Dinas P&K) sebesar Rp. 862.931.457.144,- (46,10% dari total anggaran empat pilar). Kemudian sector pengembangan infrastruktur (PUPR) sebesar Rp. 717.237.276.310,- (38,32% dari total empat pilar). Sektor Kesehatan (Dinkes) sebesar Rp. 168.704.188.218,- (9,01% dari total empat pilar).

Pada setiap pilar SDGs, dalam konteks pembangunan berkelanjutan, perlu memperhatikan porsi yang seimbang di Pilar Ekonomi, dimana dana pembangunannya masih 4,10% dari total anggaran untuk keempat pilar, dan hanya 4,29% dari dana yang dialokasikan untuk Pilar Sosial dan Pilar Lingkungan. Memperhatikan NTT, secara defacto, merupakan sebuah kepulauan dengan jumlah pulau lebih dari 500 buah, walaupun secara de jure belum ditetapkan status ini, namun, mengingat potensi kelautan dan perikanan dan wisata bahari yang cukup besar dan laut sebagai urat nadi ekonomi, maka pembangunan berwawasan kelautan menjadi sangat relevan. Di samping itu, pulau-pulau kecil yang tersebar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Timur banyak dihuni oleh penduduk dengan mata pencaharian sebagainelayan, disamping pulau-pulau besar atau utama yang mayoritas

penduduknya adalah petani. Disamping itu, perdagangan antar pulau atau antar pelabuhan dalam satu pulau, menjadikan laut sebagai urat nadi ekonomi dan jalur transportasi masyarakat NTT yang cukup populer. Sebagaimana diketahui, di dalam Pilar Ekonomi, terdapat sector Pertanian dan Kelautan yang menjadi pengayom ekonomi 70 % penduduk NTT (Petani dan Nelayan), alokasi anggaran untuk kedua sektor ini hanya Rp. 68.877.268.598,- (3,68%) dari total anggaran untuk empat pilar. Oleh karena itu Pilar Ekonomi perlu mendapat perhatian untuk menumbuhkan kekuatan ekonomi berbasis pulau dan air sebagai bagian dari mendukung upaya percepatan peningkatan ekonomi dari masyarakat NTT.

Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menjadi andalan pemerintah sekarang juga mendapat alokasi yang kurang memadai, yaitu sebesar Rp.4.873.818.368,-(6,35% dari total anggaran Pilar Ekonomi) dan hanya 0,26% dari total Anggaran untuk empat Pilar SDGs.

Hal lain yang juga perlu menjadi perhatian adalah penyusunan program yang harus diarahkan dengan pendekatan holistik dan didasarkan pada suatu landasan teori yang berkualitas dan jelas, termasuk dalam aspek pengarusutamaan gender(Goal 5) disemua Tujuan SDGs dan seluruh program dan aktivitas di semua SDGs lainnya di semua program/kegiatan pembangunan. Dengan demikian memungkinkan terwujudnya distribusi peran diantara para actor pembangunan secara baik dan representative sesuai tupoksi masing-masing pada wilayah kerja yang sama. Hal ini berlandaskan pada prinsip SDGs/SDGs -Multi-Stakeholder Partnerships - memungkinkan terbukanya peluang bagi terlaksananya kegiatan pembangunan secara kolaboratif dan jelas keterkaitan antar goal SDGs-nya.

Agar pelaksanaan pencapaian SDGs di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilakukan secara benar dan terprogram, penggunaan nomenklatur indikator SDGs yang sesuai dengan Metadata Indikator (edisii), sesuai arahan dari Sekretariat Nasional SDGs di Kementerian PPN/Bappenas harus dikawal agar dipakai dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) mendatang dan RPJMD gubernur terpilih, serta didorong agar indikator-indikator SDGs tertuang secara gamblang dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah (RPJMD) dan menjadi bagian dari IKU dan IKK.

Indikator SDGs telah dibuat agar dapat mendukung terlaksananya perencanaan berbasis tema. Setiap indikator SDGs idealnya harus menjadi satu tema yang dapat digunakan untuk memayungi perencanaan yang lebih

mendetail dan holistic lintas sektor dan lintas actor (pembangunan pemerintah maupun non-pemerintah).

Sesuai dengan prioritas pembangunan dan kemampuan daerah, maka ketersediaan data target dan capaian untuk masing-masing indikator SDGs terpilih harus menjadi prioritas diadakan dalam upaya penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang berbasis SDGs dalam masa transisi mendatang. Pemilahan yang jelas antara data mana yang dapat disediakan oleh BPS dan data mana yang harus diambil dari OPD terkait harus ada agar perencanaan pembangunan daerah menjadi lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian pendekatan perencanaan dalam konteks SDGs - dengan prinsip No One Left Behind menjadi roh dan inspirator dalam memastikan kalangan masyarakat yang paling membutuhkan yang mendapatkan dampak dari pelaksanaan pembangunan.

Prinsip kolaborasi dengan pendekatan kemitraan multi pihak antara actor pemerintah dan aktor non pemerintah menjadi solusi untuk mempercepat pencapaian SDGs di Nusa Tenggara Timur. Aktor Non Pemerintah dalam pendekatan tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi mitra strategis untuk menuntaskan berbagai persoalan masyarakat yang terindikasi dalam indikator-indikator yang tersebar dalam 17 SDGs dan dalam dokumen perencanaan daerah. Kolaborasi antar actor ini akan menjadi pendekatan pembangunan modern kedepan. Karena itu, Pemerintah Daerah perlu memfasilitasi peran aktor-aktor non pemerintah yang menjadi mitra pemerintah ini dapat memberikan kontribusi mereka, terutama dan terpenting adalah kontribusi mereka menjadi bagian dari laporan tahunan SDGs yang dikompilasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Terakhir, program/kegiatan pembangunan berbasis SDGs yang sukses (Best Practice), perlu dikumpulkan atau dikompilasi dan didokumentasikan secara sistematis sebagai pengetahuan (knowledge) bagi banyak pihak. Best Practice dalam kolaborasi menjadi ceritera sukses dapat dirayakan bersama oleh para pelaku pembangunan terkait, sehingga, kedepan, kualitas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan menjadi sasaran bersama dan dapat member pelajaran kepada para pihak yang lain untuk juga mensukseskan program/kegiatan pembangunannya.

Secara manajerial, perlu ada kapasitas yang terbangun untuk mengelola data/informasi SDGs, data target dan pencapaian SDGs, serta data praktek terbaik ditata dalam satu system pencatatan yang baik agar menjadi sumber pembelajaran pengetahuan yang mudah diakses dan ter-update secara regular.